

PERNYATAAN TELAH DIVALIDASI

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Dokumen : Rencana Kerja Tahun 2026

Perangkat Daerah : Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia

telah melalui proses verifikasi, pemeriksaan, dan validasi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, dokumen di atas dinyatakan **VALID**, sah, sesuai dengan data asli, serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parit Malintang, 26 Juni 2026

Paraf Verifikasi	
Ka. Bapelitbangda	
Inspektur	
Kabag Organisasi	



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN



BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2026



**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
TAHUN 2025**



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

Parik Malintang Kecamatan Anam Lingkuang, E-mail : bkpsdm.padangpariaman@gmail.com
Website: www.bkpsdm.padangpariamankab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR: 800/476/KEP/BKPSDM-2025**

**TENTANG
RENCANA KERJA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2026**

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

4. Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 Nomor 2);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Padang Pariaman Tentang Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026.
- KEDUA : Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA adalah Dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan untuk Periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2026 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.
- KETIGA : Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA adalah sebagai :
- a. Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Padang Pariaman.
 - b. Pedoman Penyusunan RKA dan DPA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Padang Pariaman
 - c. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
 - d. Pedoman dalam pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Padang Pariaman.
- KEEMPAT : Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Padang Pariaman.

KELIMA : Sebagai akibat dari ditetapkannya Surat Keputusan Kepala Dinas ini, Anggaran Penyusunan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026 dibebankan kepada APBD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026.

Ditetapkan di Parit Malintang
Pada tanggal, 22 Oktober 2025

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**



MAZZAR, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19700528 199303 1 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala karunia serta rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026 dapat terselesaikan dengan baik.

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Tujuan disusunnya Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026 adalah untuk menggambarkan secara menyeluruh tentang Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang meliputi Evaluasi Pelaksanaan Rencana kerja tahun lalu dan Capaian Renstra Organisasi Perangkat Daerah serta Tujuan dan Sasaran Program Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026.

Penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah merupakan tahapan perencanaan lanjutan setelah melalui proses pembahasan rancangan renja baik melalui proses forum OPD, Musrenbang Kecamatan maupun melalui proses Musrenbang Kabupaten yang dilakukan secara berjenjang dengan harapan untuk menjaga konsistensi dan sinergitas dokumen perencanaan.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026 diharapkan dapat menjadi acuan dalam Pelaksanaan Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Padang Pariaman kedepan.

Parit Malintang, 22 Oktober 2025

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**



MAIZAR, S.Sos

Pembina Utama Muda

NIP. 19700528 199303 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Penyusunan.....	7
1.3. Maksud dan Tujuan.....	9
1.4. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU.....	14
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra BKPSDM.....	14
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BKPSDM.....	32
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi PD.....	51
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	52
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	61
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	62
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	62
3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	66
3.3. Program dan Kegiatan.....	69
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	82
BAB V PENUTUP.....	103

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan salah satu upaya strategis yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) menjadi instrumen penting yang berfungsi sebagai panduan dalam pelaksanaan pembangunan di daerah. Renja PD mencerminkan komitmen dan rencana setiap perangkat daerah dalam menjawab tantangan dan kebutuhan pembangunan yang spesifik di wilayah mereka. Dokumen ini menjadi landasan bagi perangkat daerah dalam menjalankan program dan kegiatan yang akan dilakukan dalam satu tahun anggaran.

Selain berfungsi sebagai panduan, Renja PD juga merupakan alat kontrol yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja perangkat daerah dalam mencapai target-target pembangunan yang telah ditetapkan. Dengan adanya Renja PD, pemerintah daerah dapat memonitor efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program serta memperbaiki kekurangan dalam implementasi kebijakan. Oleh karena itu, penyusunan Renja PD yang baik dan tepat waktu menjadi sangat krusial untuk memastikan bahwa arah pembangunan daerah sesuai dengan visi dan misi pemerintah daerah.

Pentingnya Renja PD juga terlihat dari perannya sebagai dokumen yang mendukung sinergi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Keselarasan antara Renja PD dengan dokumen perencanaan yang lebih tinggi, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Kerja Pemerintah (RKP), serta dokumen perencanaan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, menjadi kunci untuk mewujudkan pembangunan yang terkoordinasi. Dengan adanya keterkaitan ini, diharapkan program dan kegiatan di tingkat daerah dapat sejalan dengan prioritas pembangunan nasional.

Renja PD tidak hanya berfungsi sebagai dokumen perencanaan, tetapi juga menjadi dasar bagi pengalokasian anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam penyusunan APBD, Renja PD digunakan sebagai acuan untuk menentukan prioritas pendanaan bagi program dan kegiatan yang telah direncanakan. Hal ini menjadikan Renja PD sebagai bagian penting dari siklus anggaran pemerintah daerah, yang pada akhirnya bertujuan untuk mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun oleh setiap perangkat daerah sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Renja PD merinci program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh

perangkat daerah dalam rangka mencapai target-target pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Dokumen ini memuat prioritas kegiatan yang menjadi fokus perangkat daerah selama satu tahun anggaran, disertai dengan target capaian kinerja yang diharapkan.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan, Renja PD memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah selaras dengan kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renja PD juga berfungsi sebagai sarana untuk mengoordinasikan pelaksanaan program antar-perangkat daerah agar terhindar dari duplikasi kegiatan dan memastikan pemanfaatan sumber daya yang efektif dan efisien.

Dalam penyusunan Renja PD, perangkat daerah perlu memperhatikan berbagai isu strategis yang relevan dengan kondisi dan tantangan yang dihadapi oleh wilayahnya. Renja PD harus mampu menjawab kebutuhan pembangunan masyarakat serta mencerminkan kebijakan pembangunan yang adaptif dan responsif terhadap perubahan lingkungan eksternal maupun internal. Oleh karena itu, proses penyusunan Renja PD tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga melibatkan proses konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa dokumen ini dapat mengakomodasi berbagai kepentingan yang ada.

Renja PD juga berperan dalam mendorong akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Dengan adanya target-target yang jelas dalam Renja PD, perangkat daerah dapat lebih mudah diukur kinerjanya berdasarkan pencapaian program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Hal ini sejalan dengan prinsip pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result-based management*), di mana efektivitas dan efisiensi program pemerintah menjadi ukuran utama keberhasilan.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah merupakan proses yang melibatkan berbagai tahapan, mulai dari identifikasi kebutuhan hingga perumusan prioritas program dan kegiatan. Tahap awal dalam proses penyusunan Renja PD adalah melakukan analisis situasi yang mencakup evaluasi capaian kinerja tahun sebelumnya serta identifikasi masalah yang dihadapi oleh perangkat daerah. Evaluasi capaian kinerja ini menjadi dasar untuk menentukan langkah-langkah perbaikan dan penyesuaian program yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya.

Tahap berikutnya adalah identifikasi isu strategis yang relevan dengan sektor atau bidang yang menjadi tugas pokok perangkat daerah. Isu strategis ini mencakup tantangan dan peluang yang dihadapi dalam upaya mencapai tujuan pembangunan. Perangkat daerah perlu memperhatikan perkembangan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang mempengaruhi daerah, sehingga program yang direncanakan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Setelah identifikasi isu strategis, perangkat daerah menetapkan prioritas program dan kegiatan yang akan diusulkan dalam Renja PD. Prioritas ini ditentukan berdasarkan urgensi dan dampak yang diharapkan dari pelaksanaan program tersebut, serta kesesuaian dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka panjang, baik di tingkat daerah maupun nasional. Dalam proses ini, keterlibatan pemangku kepentingan, baik dari pemerintah maupun masyarakat, sangat penting untuk memastikan program yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan nyata di lapangan.

Tahap terakhir adalah penyusunan draft Renja PD yang memuat rencana program, kegiatan, serta alokasi anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut. Draft Renja PD ini kemudian dibahas dalam forum konsultasi publik, forum perangkat daerah (OPD), serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sebelum disahkan. Proses konsultasi ini bertujuan untuk mendapatkan masukan dan saran dari berbagai pihak agar dokumen Renja PD yang dihasilkan benar-benar representatif dan dapat diimplementasikan dengan baik.

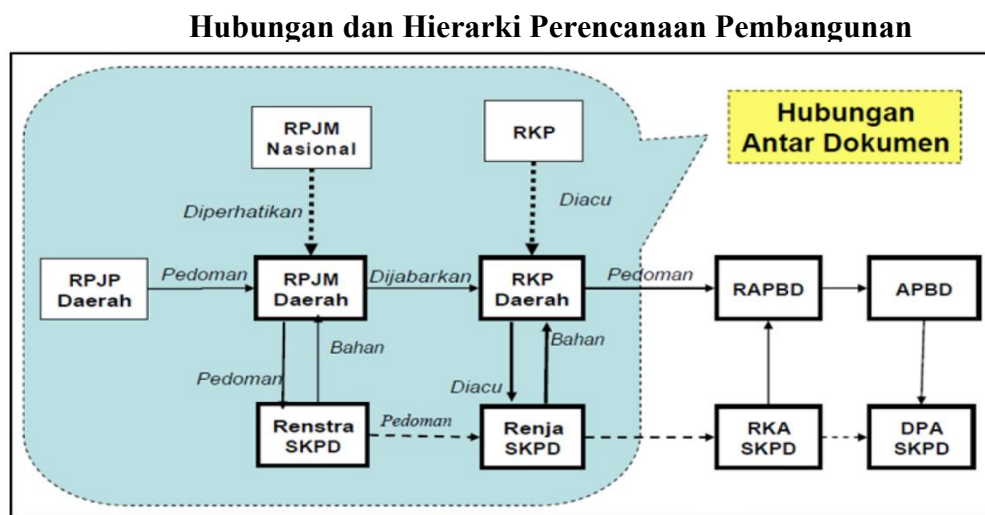
Renja Perangkat Daerah memiliki keterkaitan erat dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya, baik di tingkat daerah maupun nasional. Salah satu dokumen utama yang menjadi acuan dalam penyusunan Renja PD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun oleh pemerintah daerah sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Renja PD harus selaras dengan RKPD untuk memastikan bahwa program dan kegiatan di tingkat perangkat daerah mendukung prioritas pembangunan daerah secara keseluruhan.

Selain itu, Renja PD juga terkait dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), yang merupakan dokumen perencanaan jangka menengah untuk periode lima tahun. Renstra PD memuat visi, misi, tujuan, sasaran, serta strategi yang akan ditempuh oleh perangkat daerah untuk mencapai target pembangunan yang ditetapkan. Renja PD merupakan penjabaran tahunan dari Renstra PD, sehingga program dan kegiatan yang tercantum dalam Renja PD harus konsisten dengan arah kebijakan yang tertuang dalam Renstra PD.

Tidak hanya itu, Renja PD juga harus mempertimbangkan keterkaitannya dengan dokumen perencanaan di tingkat nasional, seperti Renja Kementerian/Lembaga (K/L), serta perencanaan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Hal ini penting terutama untuk program-program yang melibatkan kerjasama antar-pemerintah daerah atau memerlukan sinergi dengan kebijakan nasional. Dengan demikian, penyusunan Renja PD harus mempertimbangkan berbagai aspek kebijakan, baik yang bersifat lokal maupun nasional, untuk memastikan kesinambungan dan sinergi dalam pelaksanaan pembangunan.

Keterkaitan Renja PD dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya mencerminkan pentingnya koordinasi dan sinergi antar-tahapan dan tingkat perencanaan. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi tumpang tindih program dan kegiatan serta untuk memastikan bahwa alokasi sumber daya dapat digunakan secara optimal. Sinergi yang baik antara Renja PD dan dokumen perencanaan lainnya diharapkan dapat mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Adapun keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut ini.



Gambar 1.1. Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

Renja Perangkat Daerah memiliki keterkaitan yang erat dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya, seperti RPJMD, RKPD, dan Renstra (Rencana Strategis) Perangkat Daerah. Renja menjadi dokumen operasional tahunan yang menguraikan secara lebih rinci mengenai program dan kegiatan yang sudah diidentifikasi dalam Renstra. Dengan demikian, Renja menjadi instrumen untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan Renstra, yang memiliki jangka waktu lima tahun, berjalan sesuai target.

Selain itu, Renja juga menjadi salah satu acuan utama dalam penyusunan RKPD, di mana RKPD mengakomodasi semua Renja dari seluruh perangkat daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Proses ini menunjukkan adanya keterkaitan yang kuat antara Renja dengan RPJMD dan RKPD sebagai instrumen perencanaan yang lebih makro. Keterkaitan ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan pembangunan di tingkat Dinas berjalan sejalan dengan visi besar pembangunan daerah secara keseluruhan.

a. Keterkaitan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029

Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia disusun dengan mengacu pada visi dan misi jangka menengah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029. RPJMD menetapkan arah pembangunan daerah untuk lima tahun ke depan, dan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan salah satu instrumen implementasi tahunan yang mendukung pencapaian tujuan tersebut. Dalam RPJMD, telah ditetapkan sasaran dan indikator kinerja yang ingin dicapai pada akhir periode lima tahun. Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merinci sasaran dan indikator ini ke dalam target-target tahunan yang lebih operasional .

RPJMD memuat program prioritas dan strategi pembangunan yang mencakup berbagai sektor penting untuk kemajuan daerah. Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dirancang untuk mendukung program prioritas ini melalui kegiatan yang spesifik dan terukur. Salah satu aspek penting dalam keterkaitan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan RPJMD adalah penyalarsan anggaran. RPJMD mengarahkan alokasi sumber daya ke sektor-sektor prioritas dan Renja Dinas memastikan penggunaan anggaran yang sesuai dengan arah kebijakan tersebut. Dengan mengarahkan anggaran pada program yang mendukung sasaran RPJMD, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dapat berkontribusi secara efektif terhadap pencapaian target jangka menengah, sekaligus memastikan bahwa anggaran yang digunakan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat Kabupaten Padang Pariaman.

b. Keterkaitan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026

Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan implementasi dari visi dan misi RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026, yang bertujuan untuk mendorong pembangunan daerah secara menyeluruh. Misalnya, jika RKPD menitikberatkan pada peningkatan kualitas infrastruktur dan pelayanan publik, Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia akan menyalarskan program-programnya untuk mendukung pencapaian tersebut. Oleh karena itu, Renja ini disusun dengan memperhatikan prioritas utama pemerintah daerah, memastikan sinergi antara tujuan spesifik dinas dan arah pembangunan kabupaten.

Sasaran strategis yang terdapat dalam RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 memberikan panduan bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk menetapkan sasaran operasional dalam Renja. Dalam konteks ini, Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia diarahkan untuk mencapai target yang lebih rinci dan spesifik guna mendukung sasaran jangka menengah RKPD. Program prioritas dalam RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 menjadi acuan utama bagi Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk merancang kegiatan yang berfokus pada hasil yang berdampak langsung bagi masyarakat. Sebagai contoh, apabila RKPD memiliki prioritas dalam bidang kesehatan, maka Renja Dinas Kesehatan akan mencakup program-program seperti peningkatan fasilitas kesehatan, penyuluhan kesehatan masyarakat, atau program imunisasi, yang semuanya sejalan dengan prioritas RKPD. Dengan demikian, Dinas dapat memastikan bahwa program-program yang dilaksanakan benar-benar mendukung prioritas pemerintah daerah.

Dalam penyusunan Renja, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia juga perlu memperhatikan pengalokasian anggaran agar sejalan dengan kemampuan keuangan daerah yang tercantum dalam RKPD. Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia didesain untuk mengoptimalkan anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan fokus pada kegiatan yang mendukung program prioritas RKPD. Sinergi antara Renja dan RKPD dalam hal pengalokasian anggaran ini memastikan bahwa sumber daya yang tersedia dimanfaatkan secara efektif dan efisien untuk mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan, serta memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Kabupaten Padang Pariaman.

c. Keterkaitan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029

Renstra merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, dan sasaran kinerja yang ingin dicapai oleh dinas selama periode lima tahun. Sementara itu, Renja adalah rencana tahunan yang merupakan penjabaran dari Renstra, memuat program, kegiatan, dan anggaran yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Keterkaitan ini menunjukkan bahwa Renja merupakan pelaksanaan konkret dari arah kebijakan yang sudah ditetapkan dalam Renstra.

Dalam proses perencanaan, Renja harus disusun dengan mengacu pada Renstra agar program dan kegiatan tahunan yang direncanakan dapat selaras dengan tujuan strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Hal ini memastikan bahwa kegiatan tahunan yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tidak hanya bersifat rutinitas, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap pencapaian visi dan misi jangka menengah. Dalam konteks

Kabupaten Padang Pariaman, ini berarti Renja tahun 2025-2029 harus selaras dengan visi pembangunan daerah, seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan infrastruktur daerah.

Selain itu, keterkaitan antara Renja dan Renstra juga terlihat dari penggunaan indikator kinerja yang konsisten. Renstra menetapkan target kinerja jangka menengah yang kemudian diukur secara tahunan melalui Renja. Dengan demikian, Renja juga berfungsi sebagai alat untuk memantau dan mengevaluasi pencapaian kinerja dinas dalam jangka pendek, sehingga dinas dapat menyesuaikan strategi atau program tahunan sesuai dengan capaian yang diperoleh dari tahun sebelumnya.

Terakhir, sinkronisasi antara Renja dan Renstra juga penting untuk memastikan alokasi anggaran yang tepat dan efisien. Anggaran yang dialokasikan dalam Renja harus mendukung prioritas yang ditetapkan dalam Renstra, sehingga setiap kegiatan yang direncanakan dapat memberikan dampak maksimal terhadap pencapaian tujuan strategis dinas dan pembangunan daerah secara keseluruhan. Hal ini juga membantu dalam transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran dinas di Kabupaten Padang Pariaman

Renja Perangkat Daerah tidak hanya berfungsi sebagai dokumen perencanaan, tetapi juga sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Dalam proses penyusunan RAPBD, program dan kegiatan yang tercantum dalam Renja PD menjadi acuan untuk menentukan prioritas pendanaan. Hal ini penting karena anggaran yang dialokasikan dalam RAPBD harus mencerminkan kebutuhan riil perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, serta mendukung pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan.

Proses penyusunan RAPBD diawali dengan pembahasan program dan kegiatan yang diusulkan dalam Renja PD di tingkat perangkat daerah. Program yang telah diidentifikasi sebagai prioritas dalam Renja PD.

1.2 Dasar Penyusunan

Landasan hukum dari perencanaan kinerja yang disusun oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
7. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 6968);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
12. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting
13. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 5889 Tahun 2021 Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4);
 17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Nomor 4);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 Nomor 6);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 Nomor 2);
 21. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Padang Pariaman;
 22. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 22 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026 adalah sebagai pedoman bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Padang Pariaman dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan Pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2026 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Padang Pariaman selama kurun waktu 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2026;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyajian Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja OPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja OPD, proses penyusunan Renja OPD, keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD, Renstra OPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja OPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1),

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

- 1) Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- 2) Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- 3) Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- 4) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
- 5) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra OPD; dan
- 6) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Berisikan uraian mengenai:

- 1) Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD;
- 3) Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan SDGs (Millenium Developmnet Goals);
- 4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD dan;

- 5) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

- 1) Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
- 2) Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
- 3) Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda; dan

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada OPD Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

- 1) Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
- 2) Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD

BAB. III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja OPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

- 1) Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

- 2) Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
 - a) Jumlah program dan jumlah kegiatan.
 - b) Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
 - c) Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
 - d) Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- 1) Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- 2) Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- 3) Rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra BKPSDM

Pada tahun lalu, pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah mengalami berbagai dinamika yang mempengaruhi pencapaian target yang telah ditetapkan. Secara umum, evaluasi menunjukkan bahwa beberapa program berhasil dilaksanakan dengan baik, sementara ada pula yang mengalami kendala. Penilaian ini dilakukan dengan mengacu pada indikator kinerja yang telah disusun sebelumnya, sehingga memungkinkan untuk mengidentifikasi area yang perlu perbaikan. Dalam banyak hal, kolaborasi antarunit kerja menjadi faktor penting dalam mencapai hasil yang diharapkan, meskipun terdapat tantangan dalam koordinasi dan komunikasi.

Capaian Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah juga menjadi sorotan dalam evaluasi ini. Terdapat beberapa program prioritas yang telah mencapai atau bahkan melampaui target yang ditetapkan, terutama dalam hal peningkatan infrastruktur dan pelayanan publik. Namun, masih ada sejumlah indikator yang belum optimal, menunjukkan perlunya penguatan strategi dan sumber daya. Pelaksanaan Renja yang sejalan dengan Renstra sangat penting untuk memastikan bahwa visi dan misi daerah dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Dalam upaya meningkatkan kinerja ke depannya, evaluasi ini memberikan rekomendasi untuk menyusun program kerja yang lebih terintegrasi dan berbasis data. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penguatan sistem monitoring dan evaluasi menjadi langkah strategis yang harus diambil. Dengan demikian, diharapkan pelaksanaan Renja dan capaian Renstra perangkat daerah di masa mendatang dapat lebih baik, serta mampu menjawab tantangan pembangunan yang dihadapi.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun lalu (2024) berdasarkan target indikator kinerja program/kegiatan/sub kegiatan sebagai berikut :

2.1.1 Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada renstra;

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja				Anggaran	Realisasi Anggaran	
		Target	Realisasi	%	Satuan	(Rp)	(Rp)	%
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	100	100	100	Persentase	46.635.525,00	42.753.510,00	91,68
		100	100	100	Persentase			
	Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	5	100	Dokumen	46.635.525,00	42.753.510,00	91,68
		5	5	100	Laporan			
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	5	100	Dokumen	13.354.600,00	11.330.500,00	84,84

**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
RENJA 2026**

2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	5	100	Dokumen	33.280.925,00	31.423.010,00	94,42
JUMLAH						46.635.525,00	42.753.510,00	91,68

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Pencapaian Kinerja			Anggaran	Realisasi Anggaran	
		Target	Realisasi	%	Satuan	(Rp)	(Rp)	%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota		100	100	100	Persentase	13.073.732.582,00	8.947.159.251,00	68,43
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4	4	100	Laporan	13.073.732.582,00	8.947.159.251,00	68,43
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	60	245	100	Orang / Bulan	12.968.766.582,00	8.842.212.251,00	68,18
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	12	100	Dokumen	100.800.000,00	100.800.000,00	100,00
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4	4	100	Laporan	4.166.000,00	4.147.000,00	99,54
	JUMLAH					13.073.732.582,00	8.947.159.251,00	68,43

3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Pencapaian Kinerja			Anggaran	Realisasi Anggaran	
		Target	Realisasi	%	Satuan	(Rp)	(Rp)	%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota		100	100	100	Persentase	182.845.400,00	171.137.113,00	93,60
		A	A	100	Nilai			
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		3500	3500	100	Surat	182.845.400,00	171.137.113,00	93,60
		10	10	100	Pelayanan			
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penanganan Bangunan Kantor	12	12	100	Paket	10.900.000,00	10.900.000,00	100,00
2	Fasilitas Kunjungan Tamu	285	285	100	Laporan	4.000.000,00	3.896.200,00	97,41
3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	166	162	100	Laporan	167.945.400,00	156.340.913,00	93,09
	JUMLAH					182.845.400,00	171.137.113,00	93,60

4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Pencapaian Kinerja			Anggaran	Realisasi Anggaran	
		Target	Realisasi	%	Satuan	(Rp)	(Rp)	%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota		100	100	100	Persentase	310.019.329,00	307.505.750,00	99,19
		A	A	100	Nilai			
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		12	12	100	Bulan	310.019.329,00	307.505.750,00	99,19
		12	12	100	Bulan			

**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
RENJA 2026**

1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500	1112	100	Laporan	17.561.699,00	16.626.000,00	94,67
2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4	4	100	Laporan	14.660.000,00	14.320.000,00	97,68
3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	12	100	Laporan	277.797.430,00	276.559.750,00	99,55
JUMLAH						310.019.329,00	307.505.750,00	99,19

5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Pencapaian Kinerja			Anggaran	Realisasi Anggaran	
		Target	Realisasi	%	Satuan	(Rp)	(Rp)	%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota		A	A	100	Nilai	33.020.000,00	30.811.150,00	93,31
		100	100	100	Persentase			
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2.008.673.316	2.008.673.316	100	Rupiah	33.020.000,00	30.811.150,00	93,31
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Peroengangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	6	4	100	Unit	33.020.000,00	30.811.150,00	93,31
	JUMLAH					33.020.000,00	30.811.150,00	93,31

b. Program Kepegawaian Daerah

1. Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Pencapaian Kinerja			Anggaran	Realisasi Anggaran	
		Target	Realisasi	%	Satuan	(Rp)	(Rp)	%
Program Kepegawaian Daerah		80	80	100	Persentase	869.999.340,00	626.631.504,00	72,02
		92	92	100	Persentase			
		95	95	100	Persentase			
		90	90	100	Persentase			
Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		700	700	100	Formasi	869.999.340,00	626.631.504,00	72,02
		300	300	100	Orang			
		6664	6664	100	Orang			
		1	1	100	Laporan			
1	Penyusunan Rencana Kebutuhan formasi Pelaksanaan Pengadaan ASN	1	2	100	Dokumen	11.985.350,00	11.042.950,00	92,13
2	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	765	908	100	Dokumen	790.684.050,00	549.615.908,00	69,51
3	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	220	446	100	Dokumen	23.120.040,00	23.120.040,00	100,00
4	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	1	1	100	Lembaga	6.489.900,00	6.449.900,00	99,38

**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
RENJA 2026**

5	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	6058	6103	100	Dokumen	25.720.000,00	24.991.506,00	97,16
6	Pengelolaan Data Kepegawaian	6672	6842	100	Dokumen	12.000.000,00	11.411.200,00	95,09
JUMLAH						869.999.340,00	626.631.504,00	72,02

2. Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Pencapaian Kinerja			Anggaran	Realisasi Anggaran	
		Target	Realisasi	%	Satuan	(Rp)	(Rp)	%
Program Kepegawaian Daerah		80	80	100	Persentase	316.983.100,00	301.062.610,00	95,16
		90	90	100	Persentase			
Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN		145	145	100	Orang	316.983.100,00	301.062.610,00	95,16
		4	4	100	Kegiatan			
1	Pengelolaan Mutasi ASN	1800	311	100	Dokumen	19.500.100,00	17.197.500,00	88,19
2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1380	1397	100	Dokumen	177.722.350,00	168.920.860,00	95,04
3	Pengelolaan Promosi ASN	7	7	100	Dokumen	119.760.650,00	114.944.250,00	95,97
	JUMLAH					316.983.100,00	301.062.610,00	95,16

3. Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Pencapaian Kinerja			Anggaran	Realisasi Anggaran	
		Target	Realisasi	%	Satuan	(Rp)	(Rp)	%
Program Kepegawaian Daerah		90	90	100	Persentase	148.045.019,00	105.872.300,00	71,51
Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN		400	400	100	Laporan	148.045.019,00	105.872.300,00	71,51
		1	1	100	Laporan			
		2	2	100	Laporan			
1	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	30	30	100	Orang	31.350.000,00	30.977.500,00	98,81
2	Pengelolaan Assesment Center	2	2	100	Dokumen	82.506.420,00	44.056.900,00	53,39
3	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	50	50	100	Orang	12.547.599,00	12.026.900,00	95,85
4	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	500	226	100	Orang	21.641.000,00	18.811.000,00	86,92
	JUMLAH					148.045.019,00	105.872.300,00	71,51

4. Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Pencapaian Kinerja			Anggaran	Realisasi Anggaran	
		Target	Realisasi	%	Satuan	(Rp)	(Rp)	%
Program Kepegawaian Daerah		90	90	100	Persentase	103.434.500,00	90.648.651,00	87,63
		95	95	100	Persentase			
		80	80	100	Persentase			
		90	90	100	Persentase			
Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja		2	2	100	Laporan	103.434.500,00	90.648.651,00	87,63
		6891	6891	100	Orang			

**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
RENJA 2026**

Aparatur		2	2	100	Dokumen			
		200	200	100	Orang			
		3	3	100	Laporan			
1	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1	1	100	Dokumen	19.720.900,00	13.901.050,00	70,48
2	Evaluasi Hasil Penilaian Dan Evaluasi Kinerja Aparatur	6891	7819	100	Laporan	33.492.000,00	33.300.578,00	99,42
3	Pengelolaan pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	200	188	100	Orang	16.955.000,00	16.950.073,00	99,97
4	Pembinaan Disiplin ASN	100	100	100	Orang	11.459.600,00	9.625.500,00	83,99
5	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	9	9	100	Laporan	21.406.000,00	16.520.450,00	77,17
6	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	10	21	100	Dokumen	401.000,00	351.000,00	87,53
JUMLAH						103.434.500,00	90.648.651,00	87,63

c. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

1. Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Pencapaian Kinerja				Anggaran	Realisasi Anggaran	
		Target	Realisasi	%	Satuan	(Rp)	(Rp)	%	
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia		90	90	100	Persentase	7.450.500,00	7.425.500,00	99,66	
Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis		1	1	100	Laporan	7.450.500,00	7.425.500,00	99,66	
		1	1	100	Dokumen				
1	Penyusunan Kebijakan Teknis Dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum,Inti Dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkruen,Perangkat Daerah Penunjang,Dan Urusan Pemerintahan Umum	1	1	100	Dokumen	1.045.000,00	1.045.000,00	100,00	
2	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi , Teknis Umum,Inti dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren,Perangkat Daerah Penunjang Dan Urusan Pemerintahan Umum.	30	186	100	Orang	6.405.500,00	6.380.500,00	99,60	
	JUMLAH					7.450.500,00	7.425.500,00	99,66	

2. Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja				Anggaran	Realisasi Anggaran	
		Target	Realisasi	%	Satuan	(Rp)	(Rp)	%
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	90	90	100	Persentase	60.923.500,00	59.235.200,00	97,22
	Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	1	1	100	Laporan	60.923.500,00	59.235.200,00	97,22
1	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	169	21	100	Laporan	60.923.500,00	59.235.200,00	97,22
	JUMLAH					60.923.500,00	59.235.200,00	97,22

2.1.2 Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;

Secara keseluruhan capaian realisasi program/kegiatan/sub kegiatan memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Namun ada beberapa program/kegiatan/sub kegiatan yang belum memenuhi target. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya :

- Kurang lengkapnya data yang diperlukan untuk menyusun dokumen perencanaan
- Jaringan internet sering tidak stabil dalam melakukan penginputan, sedangkan waktu penginputan data sangat sedikit

2.1.3 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Padang Pariaman sangat signifikan ketika Rencana Kerja (Renja) disusun selaras dengan Rencana Strategis (Renstra) Badan. Pertama, keselarasan ini memastikan bahwa setiap program yang dijalankan memiliki arah yang jelas dan tujuan yang terukur, sehingga meningkatkan efektivitas dalam pencapaian target. Dengan mengikuti pedoman strategis yang telah ditetapkan, Badan dapat fokus pada prioritas utama yang mendukung visi dan misi jangka menengah, mengurangi risiko penyimpangan dari tujuan awal. Berikut adalah beberapa implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2026:

- Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2026 sangat bergantung pada berbagai faktor

yang mempengaruhi pelaksanaan program di tahun-tahun sebelumnya serta kemampuan Badan dalam menyesuaikan strategi. Pertama, jika dalam pelaksanaan program di tahun-tahun sebelumnya, terdapat keterlambatan atau kendala yang signifikan, implikasinya adalah adanya potensi penurunan capaian target. Program yang tidak berjalan sesuai dengan jadwal dapat menurunkan efektivitas dan efisiensi, sehingga target yang direncanakan untuk tahun 2026 mungkin harus disesuaikan, baik dari segi volume kegiatan maupun kualitas output yang diharapkan.

- b. Implikasi lain yang bisa timbul adalah terkait dengan alokasi sumber daya. Jika Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tidak dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran dan sumber daya di tahun-tahun sebelumnya, maka untuk tahun 2026, akan ada tekanan yang lebih besar untuk mempercepat realisasi program yang tertunda. Hal ini bisa menyebabkan peningkatan beban kerja dan kebutuhan anggaran yang lebih tinggi di tahun tersebut. Keterbatasan sumber daya pada tahun 2026 juga dapat mempengaruhi kualitas program yang dilaksanakan, sehingga capaian target program Renstra mungkin tidak optimal atau bahkan terancam tidak tercapai.
- c. Monitoring dan evaluasi terhadap program-program yang berjalan tidak dilakukan secara efektif, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mungkin mengalami kesulitan dalam menilai progres dan melakukan penyesuaian yang diperlukan. Tanpa evaluasi yang tepat, masalah-masalah yang ada dalam pelaksanaan program bisa terakumulasi dan baru terlihat pada akhir periode Renstra. Ini bisa mengakibatkan target capaian di tahun 2026 menjadi tidak realistis, karena kesalahan atau kekurangan dari tahun sebelumnya tidak diidentifikasi dan diperbaiki secara tepat waktu.
- d. Perubahan kondisi eksternal seperti perubahan kebijakan, perubahan ekonomi, atau keadaan darurat (seperti pandemi atau bencana alam) juga bisa berdampak besar terhadap capaian target Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun 2026. Jika Dinas tidak siap beradaptasi dengan perubahan tersebut, target yang telah ditetapkan di awal periode Renstra mungkin harus direvisi. Oleh karena itu, fleksibilitas dalam perencanaan dan kemampuan untuk melakukan penyesuaian yang cepat menjadi kunci agar target capaian program Renstra tetap relevan dan dapat dicapai sesuai dengan harapan.

2.1.4 Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

- a. Penyusunan Rencana Aksi yang Lebih Detail dan Terfokus

Kebijakan perencanaan harus dimulai dengan penyusunan rencana aksi yang lebih detail, mencakup target antara, jadwal kegiatan, dan indikator kinerja yang lebih terperinci untuk tahun 2026. Ini akan membantu Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia dalam memetakan langkah-langkah konkrit yang harus dilakukan, serta memberikan pedoman yang jelas bagi setiap unit kerja.

b. Peninjauan Ulang Prioritas Program

Tindakan perencanaan berikutnya adalah melakukan peninjauan ulang terhadap prioritas program. Program yang kurang strategis atau tidak mendesak mungkin perlu ditunda atau dialihkan dan difokuskan pada program-program yang lebih berkontribusi terhadap capaian target Renstra. Ini membutuhkan analisis mendalam mengenai dampak setiap program terhadap pencapaian visi dan misi, serta kemampuan program tersebut untuk beradaptasi dengan perubahan kondisi eksternal. Dengan menyesuaikan prioritas, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia bisa lebih fokus pada program yang paling penting untuk mencapai target 2026.

c. Penguatan Sistem Monitoring dan Evaluasi

Kebijakan penguatan sistem monitoring dan evaluasi perlu diterapkan untuk memastikan setiap program berjalan sesuai rencana dan mencapai target yang telah ditetapkan. Penerapan M&E yang lebih intensif dan berbasis teknologi, seperti dashboard kinerja atau sistem pelaporan yang real-time, dapat membantu Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mendeteksi masalah lebih awal. Dengan begitu, Dinas dapat mengambil tindakan korektif segera, tanpa harus menunggu masalah membesar dan berdampak pada pencapaian target tahun 2026. Evaluasi berkala ini juga memungkinkan adanya fleksibilitas dalam perencanaan dan penyesuaian program sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

d. Re-alokasi dan Optimalisasi Penganggaran

Dalam hal penganggaran, kebijakan yang perlu diambil adalah melakukan re-alokasi anggaran jika terdapat program-program yang kurang efektif atau sudah tidak sesuai dengan prioritas. Sumber daya harus diarahkan untuk mendukung program yang lebih prioritas dan mendesak dalam mencapai target Renstra. Selain itu, penganggaran yang lebih efisien harus dilakukan melalui evaluasi rutin terhadap penggunaan anggaran di tahun-tahun sebelumnya, untuk menghindari pemborosan dan memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan memiliki dampak maksimal. Strategi optimalisasi anggaran ini dapat mencakup penghematan di pos-pos tertentu, peningkatan kapasitas SDM, atau pemanfaatan teknologi yang lebih canggih untuk mendukung pelaksanaan program.

TABEL 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA BKPSDM DAN PENCAPAIAN RENSTRA BKPSDM S/D TAHUN 2025
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah Tahun s/d tahun berjalan (2024)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun berjalan (n-1) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Kepegawaian									
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rekomendasi LHE SAKIP yang ditindak lanjuti	100%	300%	100%	100%	100%	100%	500%	500%
		Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100%	300%	100%	100%	100%	100%	500%	500%
		Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	87,00	-	87,00	-	-	87,00	-	-
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan sesuai aturan dan tepat waktu	5 Dokumen	15 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	5 Dokumen	25 Dokumen	500%
		Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	5 Laporan	15 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	5 Dokumen	25 Dokumen	500%

**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
RENJA 2026**

	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	15 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	5 Dokumen	25 Dokumen	500%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	15 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	5 Dokumen	25 Dokumen	500%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan yang Sesuai Dengan Perundang Undangan	4 Laporan	12 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	20 Laporan	500%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji Dan Tunjangan ASN selama 14 Bulan	60 Orang	180 Orang	60 Orang	60 Orang	100%	60 Orang	300 Orang	500%
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	36 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	60 Dokumen	500%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	12 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	20 Laporan	500%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah surat dinas yang teradministrasi sesuai ketentuan dan terdistribusi sesuai tujuan	3500 Surat	10500 Surat	3500 Surat	3500 Surat	100%	3500 Surat	17500 Surat	500%

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
RENJA 2026

		Jumlah pelayanan yang terfasilitasi	10 Layanan	30 Layanan	10 Layanan	10 Layanan	100%	10 Layanan	50 Layanan	500%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	36 Paket	12 Paket	12 Paket	100%	12 Paket	60 Paket	500%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	285 Laporan	855 Laporan	285 Laporan	285 Laporan	100%	285 Laporan	1425 Laporan	500%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	166 Laporan	498 Laporan	166 Laporan	166 Laporan	100%	166 Laporan	830 Laporan	500%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah penambahan nilai aset	Rp. 72.000.000	Rp. 216.000.000	Rp. 72.000.000	Rp. 72.000.000	100%	Rp. 72.000.000	Rp. 360.000.000	500%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7 Unit	21 Unit	7 Unit	7 Unit	100%	7 Unit	35 Unit	500%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah yang tersedia	12 Bulan	36 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	60 Bulan	500%
		Jumlah jasa penunjang perkantoran yang disediakan	12 Bulan	36 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	60 Bulan	500%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500 Laporan	1500 Laporan	500 Laporan	500 Laporan	100%	500 Laporan	2500 Laporan	500%

**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
RENJA 2026**

	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	12 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	20 Laporan	500%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	36 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	60 Laporan	500%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah objek aset yang dikelola	227 Unit	681 Unit	227 Unit	227 Unit	100%	227 Unit	1135 Unit	500%
		Jumlah total nilai aset	Rp. 2.042.673.316	Rp. 6.128.019.948	Rp. 2.042.673.316	Rp. 2.042.673.316	100%	Rp. 2.042.673.316	Rp. 10.213.366.580	500%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	18 Unit	6 Unit	6 Unit	100%	6 Unit	30 Unit	500%
	Program Kepegawaian Daerah	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi	71%	-	71,00	-	-	71%	-	-
		Persentase ketersediaan data dan informasi ASN	81%	-	81,00	-	-	81%	-	-
		Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai kompetensinya	51%	-	51,00	-	-	51%	-	-

**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
RENJA 2026**

		Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	31%	-	31%	-	-	31%	-	-
		Indeks Implementasi Manajemen NSPK ASN	74,00	-	74,00	-	-	74,00	-	-
	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Lowongan Kebutuhan Formasi yang terisi	700 Formasi	2.100 Formasi	700 Formasi	700 Formasi	100%	700 Formasi	3.500 Formasi	500%
		Jumlah Pegawai yang diberhentikan dan mendapatkan pangkat pengabdian	300 Orang	900 Orang	300 Orang	300 Orang	100%	300 Orang	1.500 Orang	500%
		Jumlah Data Pegawai yang tersedia, update dan terbaru	6766 Orang	20.298 Orang	6766 Orang	6766 Orang	100%	6766Orang	33.830 Orang	500%
		Jumlah Laporan Pemberian Layanan ASN yang dilakukan	1 Laporan	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	5 Laporan	500%
	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	5 Dokumen	500%

**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
RENJA 2026**

	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	700 Dokumen	2100 Dokumen	700 Dokumen	700 Dokumen	100%	700 Dokumen	3500 Dokumen	500%
	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	220 Dokumen	660 Dokumen	220 Dokumen	220 Dokumen	100%	220 Dokumen	1100Dokumen	500%
	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	3 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	100%	1 Lembaga	5 Lembaga	500%
	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	6058 Dokumen	18.174 Dokumen	6058 Dokumen	6058 Dokumen	100%	6058 Dokumen	30.290 Dokumen	500%
	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	6672 Dokumen	20.016 Dokumen	6672 Dokumen	6672 Dokumen	100%	6672 Dokumen	33.360 Dokumen	500%
	Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah Pegawai yang dipindahkan sesuai kebutuhan dan syarat jabatan	145 Orang	435 Orang	145 Orang	145 Orang	100%	145 Orang	725 Orang	500%
		Jumlah Terlaksananya Mutasi dan Promosi ASN	7 Kegiatan	21 Laporan	7 Kegiatan	7 Kegiatan	100%	7 Kegiatan	35 Kegiatan	500%
	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	500 Dokumen	1500 Dokumen	500 Dokumen	500 Dokumen	100%	500 Dokumen	2500 Dokumen	500%

**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
RENJA 2026**

	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah ASN yg mengikuti Ujian Dinas Penyesuaian Ijazah	1380 ASN	4.140 ASN	1380 ASN	1380 ASN	100%	1380 ASN	6900 ASN	500%
	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	60 Dokumen	180 Dokumen	60 Dokumen	60 Dokumen	100%	60 Dokumen	300 Dokumen	500%
	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah Pemetaan Kompetensi ASN	7 Kegiatan	21 Kegiatan	7 Kegiatan	7 Kegiatan	100%	7 Kegiatan	35 Kegiatan	500%
		Jumlah Laporan Peningkatan Kapasitas yang dilaksanakan	1 Laporan	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	5 Laporan	500%
		Jumlah Laporan Peningkatan Kualifikasi ASN yang dilaksanakan	2 Laporan	6 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	10 Laporan	500%
	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	30 ASN	90 ASN	30 ASN	30 ASN	100%	30 ASN	150 ASN	500%
	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	1 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	5 Dokumen	500%
	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	50 ASN	150 ASN	50 ASN	50 ASN	100%	50 ASN	250 ASN	500%
	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	500 ASN	1.500 ASN	500 ASN	500 ASN	100%	500 ASN	2.500 ASN	500%
	Penilaian dan Evaluasi Kinerja ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan penghargaan dan tunjangan kinerja	200 ASN	600 ASN	200 ASN	200 ASN	100%	200 ASN	1000 ASN	500%
		Jumlah Penilaian Kinerja ASN	7128 ASN	21.384 ASN	7128 ASN	7128 ASN	100%	7128 ASN	35.640 ASN	500%

**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
RENJA 2026**

		Jumlah Dokumen Kebijakan Kepegawaian yang disusun	2 Dokumen	6 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	10 Dokumen	500%
		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Disiplin ASN	2 Laporan	6 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	10 Laporan	500%
		Jumlah Laporan Hasil Penyelesaian Kasus ASN yang diproses	3 Laporan	9 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100%	3 Laporan	15 Laporan	500%
	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Produk Hukum yang dihasilkan	1 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	5 Dokumen	500%
	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah ASN yg penilaian kinerjanya secara online	6871 ASN	20613 ASN	6871 ASN	6871 ASN	100%	6871 ASN	34.355 ASN	500%
	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang menerima penghargaan Satya Lancana karya Satya	200 ASN	600 ASN	200 ASN	200 ASN	100%	200 ASN	1000 ASN	500%
	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	50 ASN	150 ASN	100 ASN	100 ASN	100%	100 ASN	500 ASN	500%
	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	3 Laporan	9 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100%	3 Laporan	15 Laporan	500%
	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	5 Dokumen	15 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	5 Dokumen	25 Dokumen	500%
	Pendidikan dan Pelatihan									

**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
RENJA 2026**

	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	51%	-	51,00	-	-	51%	-	-
		Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	21%	-	21,00	-	-	21%	-	-
		Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	81%	-	81,00	-	-	81%	-	-
	Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah Laporan Pengembangan Kompetensi Teknis yang dilaksanakan	1 Laporan	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	5 Laporan	500%
		Jumlah Dokumen kebijakan pengembangan kompetensi yang disusun	1 Laporan	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	5 Laporan	500%
	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Pengembangan Kompetensi	1 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	5 Dokumen	500%

**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
RENJA 2026**

	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	30 ASN	90 ASN	30 ASN	30 ASN	100%	30 ASN	150 ASN	500%
	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah Laporan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1 Laporan	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	5 Laporan	500%
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah ASN yang Mengikuti Diklat Fungsional	169 ASN	507 ASN	169 ASN	169 ASN	100%	169 ASN	845 ASN	500%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BKPSDM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan pendekatan politik, pendekatan teknokratik, pendekatan partisipatif serta pendekatan bottom-up dan top down.

Menurut Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 78 Tahun 2021 tentang SOTK, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai perangkat daerah kabupaten/kota memiliki fungsi :

1. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian penyusunan kebijakan strategis badan
2. Perumusan kebijakan umum bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3. Pengendalian pelaksanaan urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam rangka mencapai target kinerja
4. Pembinaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5. Pelaksanaan tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi
6. Pembinaan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga badan
7. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan anggaran, administrasi keuangan dan aset
8. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan Perangkat Daerah, Instansi dan lembaga lainnya serta unsur masyarakat
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Padang Pariaman terdiri dari :

a) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kepala Badan mempunyai tugas :

- a. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan kebijakan strategis badan;
- b. Perumusan kebijakan umum Bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

Daya Manusia;

- c. Pengendalian pelaksanaan urusan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia dalam rangka mencapai target kinerja;
- d. Pembinaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- e. Pelaksanaan tugas pembantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi;
- f. Pembinaan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga badan;
- g. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan anggaran, administrasi keuangan dan aset;
- h. Koordinasi dan kerja sama dengan organisasi perangkat daerah, instansi dan lembaga lainnya serta unsur masyarakat; dan/ atau
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b) Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sekretaris badan mempunyai tugas :

- (1) Memberikan pelayanan administratif dan teknis meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan Aparatur Sipil Negara (ASN) kepada semua unsur dilingkungan badan serta membantu kepala badan dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang-bidang secara terpadu.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Sekretaris Badan mempunyai fungsi:
 - a. Koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
 - b. Pelaksanaan dan pengelola keuangan;
 - c. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang/kekayaan milik negara/daerah di lingkungan badan;
 - d. Pengelolaan urusan ASN;
 - e. Pemberian dukungan layanan administrasi pada seluruh unit organisasi di lingkungan badan yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi; dan/ atau
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari :

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- (1) Membantu sekretaris melaksanakan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan administrasi ASN, urusan perlengkapan rumah tangga dan penataan barang milik negara.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pelaksanaan urusan surat masuk dan keluar, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, keamanan kantor serta kenyamanan kerja;
 - b. Menghimpun dan mengelola bahan dan data kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemberhentian, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, promosi, mutasi, cuti, askes, taspen dan lain-lain;
 - c. Pengelolaan urusan perjalanan dinas dan keprotokolan;
 - d. Pengurusan hala-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai beserta keluarga seperti restitusi pengobatan dan lain- lain;
 - e. Fasilitasi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada badan;
 - f. Perencanaan dan pelaksanaan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai;
 - g. Penyiapan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang (RPBU); dan/ atau
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas :

- (1) Membantu sekretaris melakukan penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran serta penyiapan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Subbagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program rencana kerja dan anggaran badan serta penyelenggaraan administrasi penatausahaan keuangan badan;

- b. Pemeliharaan dan penyimpanan bukti dan dokumen keuangan badan;
- c. Penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja, laporan pertanggungjawaban program dan kegiatan badan;
- d. Pelaksanaan penatausahaan keuangan, perbendaharaan dan pengelolaan aset badan;
- e. Penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan serta bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan badan; dan/ atau
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

A. Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi

Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi mempunyai tugas :

- (1) Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan program Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian;
- b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian;
- c. Koordinasi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian;
- d. Penyelenggaraan kegiatan urusan di Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian;
- e. Pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian;
- f. Penyusunan pelaporan kinerja bidang; dan/ atau
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Formasi, Pengadaan dan Penataan ASN

Kelompok Jabatan Sub-Substansi Formasi, Pengadaan dan Penataan ASN mempunyai tugas :

- (1) Melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan, kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan di Bidang Formasi, Pengadaan

dan Penataan ASN.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Formasi, Pengadaan dan Penataan ASN mempunyai fungsi :
- a. Penyusun bahan rencana program dan kegiatan Subbid Formasi, Pengadaan dan Penataan ASN;
 - b. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Formasi, Pengadaan dan Penataan ASN;
 - c. Pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan kegiatan di Bidang Formasi, Pengadaan dan Penataan ASN;
 - d. Melaksanakan program dan kegiatan Subbid Formasi, Pengadaan dan Penataan ASN yang meliputi :
 - 1. melaksanakan penyusunan formasi pegawai;
 - 2. melaksanakan penetapan formasi pegawai;
 - 3. melakukan pengusulan kebutuhan formasi pegawai;
 - 4. melakukan pengusulan pengadaan pegawai;
 - 5. melakukan pengusulan pelaksanaan kir kesehatan dan sumpah ASN;
 - 6. melakukan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang dan atasan sesuai dengan tugas pokoknya.
 - e. Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di Bidang Formasi, Pengadaan dan Penataan ASN;
 - f. Pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemberhentian dan Kesejahteraan ASN

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemberhentian dan Kesejahteraan ASN mempunyai tugas :

- (1) Melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan, kebijakanteknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan di Bidang Pemberhentian dan Kesejahteraan ASN.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemberhentian dan Kesejahteraan ASN mempunyai fungsi:

- a. Penyusun bahan rencana program dan kegiatan Subbid Pemberhentian dan Kesejahteraan ASN;
- b. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Pemberhentian dan Kesejahteraan ASN;
- c. Pembinaan dan pengawasan dan koordinasi pelaksanaan kegiatan di Bidang Pemberhentian dan Kesejahteraan ASN;
- d. Pelaksanaan pelayanan di Bidang Pemberhentian dan Kesejahteraan ASN;
- e. Melaksanakan program dan kegiatan Subbid Pemberhentian dan Kesejahteraan yang meliputi :
 - 1. mengoreksi dokumen-dokumen pengurusan, masapersiapan pensiun dan pemberhentian ASN;
 - 2. mengusulkan penerbitan keputusan pensiun muda gol. IV/ake bawah;
 - 3. mengusulkan dan menyiapkan fasilitasi pengurusan kartutaspen dan pengurusan taspen untuk pensiun;
 - 4. mengusulkan dan menyiapkan pencairan taperum;
 - 5. menyusun kebijakan-kebijakan yang menyangkut kesejahteraan ASN; dan/ atau
 - 6. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh kepalabidang dan atasan sesuai dengan tugas pokoknya.
- f. Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di Bidang Formasi, Pengadaan dan Penataan ASN;
- g. Pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengantugas dan fungsinya.

3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengolahan Data, Informasi dan Status Kepegawaian

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengolahan Data, Informasi dan Status Kepegawaian mempunyai tugas :

- (1) Melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan, kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan di Bidang Pengolahan Data, Informasi dan Status Kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kelompok Jabatan Sub-Substansi Pemberhentian dan Kesejahteraan ASN mempunyai fungsi:

- a. Penyusun bahan rencana program dan kegiatan Subbid Pengolahan Data, Informasi dan Status Kepegawaian;
- b. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengolahan Data, Informasi dan Status Kepegawaian;
- c. Pembinaan dan pengawasan dan koordinasi pelaksanaan kegiatan di Bidang Pengolahan Data, Informasi dan Status Kepegawaian;
- d. Pelaksanaan pelayanan di Bidang Pengolahan Data, Informasi dan Status Kepegawaian;
- e. Melaksanakan program dan kegiatan Subbid Pengolahan Data, Informasi dan Status Kepegawaian yang meliputi :
 1. melakukan pengelolaan data kepegawaian;
 2. melakukan pengelolaan teknologi informasi kepegawaian;
 3. melakukan pengelolaan arsip kepegawaian;
 4. melakukan fasilitasi kartu-kartu kepegawaian;
 5. melakukan fasilitasi penerbitan konversi NIP; dan/ atau
 6. melakukan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang dan atasan sesuai dengan tugas pokoknya.
- f. Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di Bidang Pengolahan Data, Informasi dan Status Kepegawaian;
- g. Pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Kepala Bidang Mutasi dan Penilaian Kinerja

Bidang Mutasi dan Penilaian Kinerja mempunyai tugas :

- (1) Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan Bidang Mutasi dan Penilaian Kinerja.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Mutasi dan Penilaian Kinerja mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan perencanaan program Bidang Mutasi dan Penilaian Kinerja;
 - b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Mutasi dan Penilaian Kinerja;
 - c. Koordinasi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan mutasi dan penilaian kinerja;
 - d. Penyelenggaraan kegiatan urusan di Bidang Mutasi dan Penilaian Kinerja;

- e. Pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di Bidang Mutasi dan Penilaian Kinerja;
- f. Penyusunan pelaporan kinerja Bidang Mutasi dan Penilaian Kinerja; dan/ atau
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Mutasi Kepangkatan

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Mutasi Kepangkatan mempunyai tugas :

- (1) Melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan, kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan di Bidang Mutasi Kepangkatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kelompok Jabatan Sub-Substansi Mutasi Kepangkatan mempunyai fungsi :
 - a. Penyusun bahan rencana program dan kegiatan Subbid Mutasi Kepangkatan;
 - b. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Mutasi Kepangkatan;
 - c. Pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan kegiatan di Bidang Mutasi Kepangkatan;
 - d. Pelaksanaan pelayanan di Bidang Mutasi Kepangkatan;
 - e. Melaksanakan program dan kegiatan Subbid Mutasi Kepangkatan yang meliputi :
 - 1. melakukan pengelolaan kenaikan pangkat ASN;
 - 2. melakukan pengelolaan kenaikan gaji berkala ASN;
 - 3. melakukan pelaksanaan ujian dinas dan penyesuaian ijazah; dan/ atau
 - 4. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang dan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - f. Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di Bidang Mutasi Kepangkatan;
 - g. Pelaporan pelaksanaan kegiatan di Bidang Mutasi Kepangkatan; dan/ atau
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Mutasi Jabatan

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Mutasi Jabatan mempunyai

tugas :

- (1) Melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan, kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan di Bidang Mutasi Jabatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kelompok Jabatan Sub-Substansi Mutasi Jabatan mempunyai fungsi :
 - a. Penyusun bahan rencana program dan kegiatan Subbid Mutasi Jabatan;
 - b. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Mutasi Jabatan
 - c. Pembinaan dan pengawasan dan koordinasi pelaksanaan kegiatan di Bidang Mutasi Jabatan;
 - d. Pelaksanaan pelayanan di Bidang Mutasi Jabatan;
 - e. Melaksanakan program dan kegiatan Subbid Mutasi Jabatanyang meliputi :
 1. melaksanakan pengelolaan perpindahan dalam jabatan, promosi dan demosi jabatan struktural;
 2. melaksanakan pengelolaan pengangkatan pertama kali, perpindahan dari jabatan lain, pemberhentian sementara, pengangkatan kembali dan pemberhentian jabatan fungsional tertentu; dan/ atau
 3. melaksanakan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang dan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - f. Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di Bidang Mutasi Jabatan;
 - g. Pelaporan pelaksanaan kegiatan di Bidang Mutasi Jabatan; dan/atau
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengantugas dan fungsinya.

3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penilaian Kinerja

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penilaian Kinerja mempunyai tugas :

- (1) Melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan, kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan di Bidang Penilaian Kinerja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kelompok Jabatan Sub-Substansi Penilaian Kinerja mempunyai fungsi :
 - a. Penyusun bahan rencana program dan kegiatan Subbid PenilaianKinerja;
 - b. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Penilaian Kinerja;
 - c. Pembinaan dan pengawasan dan koordinasi pelaksanaan kegiatan di

Bidang Penilaian Kinerja;

- d. Pelaksanaan pelayanan di Bidang Penilaian Kinerja;
- e. Melaksanakan program dan kegiatan Subbid Penilaian Kinerja ASN yang meliputi :
 - 1. memeriksa hasil penilaian kinerja ASN;
 - 2. memfasilitasi pelaksanaan penilaian DUPAK dan PAKASN dalam jabatan fungsional tertentu;
 - 3. memfasilitasi pelaksanaan penilaian kinerja guru;
 - 4. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang dan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - 5. melakukan evaluasi kinerja ASN secara periodik;
 - 6. fasilitasi penyusunan SKP pejabat struktural.
- f. Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di Bidang Penilaian Kinerja;
- g. Pelaporan pelaksanaan kegiatan di Bidang Penilaian Kinerja; dan/atau
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E. Bidang Pengembangan Kompetensi SDM dan Pembinaan ASN

Bidang Pengembangan Kompetensi SDM dan Pembinaan ASN mempunyai tugas:

- (1) Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan Bidang Pengembangan Kompetensi SDM dan Pembinaan ASN.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Pengembangan Kompetensi SDM dan Pembinaan ASN mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan perencanaan program Bidang Pengembangan Kompetensi SDM dan Pembinaan ASN;
 - b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Pengembangan Kompetensi SDM dan Pembinaan ASN;
 - c. Koordinasi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan Pengembangan Kompetensi SDM dan Pembinaan ASN;
 - d. Penyelenggaraan kegiatan urusan di Bidang Pengembangan Kompetensi SDM dan Pembinaan ASN;
 - e. Pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di Bidang Pengembangan Kompetensi SDM dan Pembinaan ASN;
 - f. Penyusunan pelaporan kinerja Bidang Pengembangan Kompetensi SDM dan

Pembinaan ASN; dan/ atau

- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan Kompetensi Struktural

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan Kompetensi Struktural mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan, kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan di Bidang Pengembangan Kompetensi Struktural. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan Kompetensi Struktural mempunyai fungsi

- a. Penyusun bahan rencana program dan kegiatan Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan Kompetensi Struktural;
- b. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengembangan Kompetensi Struktural;
- c. Pembinaan dan pengawasan dan koordinas pelaksanaan kegiatan di Bidang Pengembangan Kompetensi Struktural;
- d. Pelaksanaan pelayanan di Bidang Pengembangan Kompetensi Struktural;
- e. Melaksanakan program dan kegiatan Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan Kompetensi Struktural yang meliputi:
 1. memfasilitasi pengembangan kompetensi ASN yang menduduki jabatan struktural meliputi diklat pim I, II, III dan IV;
 2. memfasilitasi pengembangan kompetensi CPNS berupa diklat prajabatan; dan/ atau
 3. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang dan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- f. Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di Bidang Pengembangan Kompetensi Struktural;
- g. Pelaporan pelaksanaan kegiatan di Bidang Pengembangan Kompetensi Struktural; dan/ atau
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan Kompetensi Teknis dan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan Kompetensi Teknis dan Fungsional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan, kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan di Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis dan Fungsional. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan Kompetensi Teknis dan Fungsional mempunyai fungsi :

- a. Penyusun bahan rencana program dan kegiatan Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan Kompetensi Teknis dan Fungsional;
- b. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis dan Fungsional;
- c. Pembinaan dan pengawasan dan koordinasi pelaksanaan kegiatan di Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis dan Fungsional;
- d. Pelaksanaan pelayanan di Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis dan Fungsional;
- e. Melaksanakan program dan kegiatan Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan Kompetensi Teknis dan Fungsional yang meliputi:
 1. memfasilitasi pengembangan kompetensi ASN yang menduduki jabatan fungsional;
 2. memfasilitasi pengembangan kompetensi teknis ASN;
 3. memproses pengusulan ASN yang mengikuti peningkatan pendidikan melalui tugas belajar dan izin belajar atau ikatan dinas; dan/ atau
 4. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang dan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- f. Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di Bidang Pengembangan Kompetensi Struktural;
- g. Pelaporan pelaksanaan kegiatan di Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis dan Fungsional; dan/ atau
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembinaan, Bimbingan Konseling dan Fasilitasi Profesi ASN

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembinaan, Bimbingan Konseling dan Fasilitasi Profesi ASN mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan, kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan di bidang Pembinaan, Bimbingan Konseling dan Fasilitasi Profesi ASN, dengan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusun bahan rencana program dan kegiatan Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan Kompetensi Teknis dan Fungsional;
- b. perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis dan Fungsional
- c. Pembinaan dan pengawasan dan koordinasi pelaksanaan kegiatan di Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis dan Fungsional;
- d. Pelaksanaan pelayanan di Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis dan Fungsional;
- e. Melaksanakan program dan kegiatan Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembinaan, Bimbingan Konseling dan Fasilitasi Profesi ASN yang meliputi:
 1. melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan disiplin ASN;
 2. memproses penjatuhan hukuman disiplin ASN;
 3. memproses bahan permohonan izin perceraian ASN
 4. memberikan pemahaman/pembinaan terhadap ASN yang akan melakukan perceraian;
 5. mengkoordinir penyusunan rancangan peraturan tentang kepegawaian;
 6. mensosialisasikan peraturan kepegawaian kepada seluruh ASN;
 7. memfasilitasi penyusunan kebijakan-kebijakan organisasi
 8. profesi ASN; memfasilitasi pembentukan organisasi profesi ASN
 9. memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan organisasi profesi ASN.
- f. Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di Bidang Pengembangan Kompetensi Struktural;

- g. Pelaporan pelaksanaan kegiatan di Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis dan Fungsional; dan/ atau
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan fungsi tersebut, pada tahun 2025-2029 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Padang Pariaman mempunyai Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai sebagai berikut :

Tujuan	: 1. Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan Akuntabel 2. Terwujudnya profesionalitas ASN
Sasaran	: 1. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah 2. Meningkatkan Profesionalisme ASN 3. Meningkatkan Kualitas Manajemen ASN
Indikator Kinerja	: 1. Nilai AKIP Perangkat Daerah 2. Nilai Aspek Kualifikasi ASN 3. Nilai Aspek Kinerja ASN 4. Nilai Aspek Kompetensi ASN 5. Nilai Aspek Disiplin ASN 6. Nilai Aspek Perencanaan Kebutuhan 7. Nilai Aspek Pengadaan ASN 8. Nilai Aspek Perlindungan dan Pelayanan 9. Nilai Aspek Sistim Informasi 10. Nilai Aspek Pengembangan Karir 11. Nilai Aspek Promosi ASN sesuai Kriteria 12. Nilai Aspek Manajemen Kinerja 13. Nilai Aspek Penggajian, Penghargaan, dan Disiplin

Tabel 2.2 (T-C 30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024

No	Indikator Kinerja tahun 2024	Indikator Kinerja tahun 2025	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian		Proyeksi Capaian	Catatan Analisis
			2024	2025	2026	2024	2025	2026	
1.	Nilai SAKIP BKPSDM	Nilai SAKIP BKPSDM	A (80,01)	A (80,01)	A (80,02)	BB (76,60)	BB (78,95)	-	Berhasil
2.	Indeks kepuasan ASN terhadap pelayanan administrasi kepegawaian	-	81,00	-	-	85,3	-	-	Sangat Berhasil
3.	Indeks NSPK Manajemen ASN	-	60	-	-	72,88	-	-	Sangat Berhasil
4.	-	Nilai Aspek Kualifikasi ASN	-	21,00	22,00	-	-	-	-
5.	-	Nilai Aspek Kinerja ASN	-	25,00	26,00	-	-	-	-
6.	-	Nilai Aspek Kompetensi ASN	-	28,00	29,00	-	-	-	-
7.	-	Nilai Aspek Disiplin ASN	-	5,00	5,00	-	-	-	-
8.	-	Nilai Aspek Perencanaan Kebutuhan	-	47,00	49,00	-	-	-	-
9.	-	Nilai Aspek Pengadaan ASN	-	40,00	41,00	-	-	-	-
10.	-	Nilai Aspek Perlindungan dan Pelayanan	-	6,00	7,00	-	-	-	-
11.	-	Nilai Aspek Sistim Informasi	-	17,00	19,00	-	-	-	-
12.	-	Nilai Aspek Pengembangan Karir	-	40,00	41,00	-	-	-	-
13.	-	Nilai Aspek Promosi ASN sesuai Kriteria	-	17,00	18,00	-	-	-	-
14.	-	Nilai Aspek Manajemen Kinerja	-	46,00	47,00	-	-	-	-
15.	-	Nilai Aspek Penggajian, Penghargaan, dan Disiplin	-	37,00	38,00	-	-	-	-

Analisis kinerja pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan langkah krusial dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan memahami kinerja yang telah dicapai, kita dapat mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki dan mengembangkan strategi untuk meningkatkan kualitas pelayanan di masa depan. Tujuan utama dari analisis kinerja pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan publik di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Melalui analisis ini, kita dapat mengukur sejauh mana Dinas telah berhasil dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pelayanan.

Berikut adalah capaian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024.

Tabel 2.3
Capaian Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024			Interprestasi
				Target	Realisasi	%	
1.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja BKPSDM	Nilai SAKIP BKPSDM	Nilai	A (80,01)	BB (76,60)	95,73	Berhasil
		Indeks kepuasan ASN terhadap pelayanan administrasi kepegawaian	Indeks	81,00	85,3	105,31	Sangat Berhasil
2.	Meningkatkan Tata Kelola Manajemen Kepegawaian yang Akuntabel	Indeks NSPK Manajemen ASN	Indeks	60	72,88	121,47	Sangat Berhasil

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa :

- a. Capaian kinerja yang mencapai target ditunjukkan pada indikator :
 - 1) Indeks NSPK Manajemen ASN
 - 2) Indeks Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Kepegawaian
- b. Capaian kinerja yang belum mencapai target ditunjukkan pada indikator :
 - 1) Nilai SAKIP BKPSDM

Tabel 2.4
Capaian Kinerja Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja BKPSDM

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024			Interprestasi
				Target	Realisasi	%	
1.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja BKPSDM	Nilai SAKIP BKPSDM	Nilai	A (80,01)	BB (76,60)	95,73	Berhasil
		Indeks kepuasan ASN terhadap pelayanan administrasi kepegawaian	Indeks	81,00	85,3	105,31	Sangat Berhasil

Keberhasilan sasaran tersebut karena dukungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dan berbagai pemangku kepentingan.

Pada Sasaran Strategis pertama yaitu Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja BKPSDM, pengukuran dilakukan melalui dua indikator kinerja. Indikator pertama yaitu Nilai SAKIP BKPSDM memperoleh realisasi sebesar 76,60 (predikat BB) dari target 80,01 (predikat A), dengan tingkat capaian kinerja sebesar 95,73%. Capaian ini termasuk dalam kategori berhasil, yang menunjukkan bahwa sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan BKPSDM telah berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat ruang perbaikan terutama dalam aspek perencanaan kinerja, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi internal agar dapat mencapai predikat yang lebih tinggi. Program yang mendukung sasaran ini adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, sedangkan kegiatan yang mendukung sasaran ini, yaitu :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan yang mendukung sasaran ini yaitu :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
4. Fasilitasi Kunjungan Tamu
5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
7. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan
8. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
9. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Tabel 2.5
Capaian Kinerja Meningkatkan Tata Kelola Manajemen Kepegawaian yang Akuntabel

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024			Interprestasi
				Target	Realisasi	%	
1.	Meningkatkan Tata Kelola Manajemen Kepegawaian yang Akuntabel	Indeks NSPK Manajemen ASN	Indeks	60	72,88	121,47	Sangat Berhasil

Pada tahun 2024 ini, Indikator Kinerja Indeks NSPK Manajemen ASN menunjukkan capaian yang sangat mendekati target. Realisasi tahun 2024 berada pada angka 72,88 sedangkan untuk tahun 2025 belum keluar penilaian untuk Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Manajemen ASN di BKPSDM Padang Pariaman. Indikator Kinerja Indeks NSPK ini adalah indeks yang di keluarkan dari Kantor Regional XII BKN Pekanbaru dengan 18 (delapan belas) elemen penilaian sebagai berikut :

1. Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan ASN
2. Pengadaan ASN
3. Pengangkatan ASN
4. Pangkat
5. Mutasi
6. Jabatan
7. Pengembangan Karier ASN
8. Pola Karier
9. Penggajian, Tunjangan dan Fasilitas
10. Penghargaan
11. Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua
12. Perlindungan
13. Penilaian Kinerja
14. Cuti
15. Kode Etik
16. Disiplin
17. Pemberhentian
18. Pensiun

Program yang mendukung sasaran ini adalah Program Kepegawaian Daerah dan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia. Sub Kegiatan yang mendukung sasaran ini adalah :

1. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
2. Mutasi dan Promosi ASN
3. Pengembangan Kompetensi ASN
4. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
5. Pengembangan Kompetensi Teknis
6. Sertifikasi, Kelembagaan, Kompetensi Manajerial dan Fungsional

Sub Kegiatan yang mendukung sasaran ini yaitu :

1. Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
2. Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
3. Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
4. Fasilitasi Lembaga Profesi ASN
5. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
6. Pengelolaan Data Kepegawaian
7. Pengelolaan Mutasi ASN
8. Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
9. Pengelolaan Promosi ASN
10. Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN
11. Pengelolaan Assessment Center
12. Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
13. Pembinaan Jabatan Fungsional ASN
14. Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
15. Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
16. Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai
17. Pembinaan Disiplin ASN
18. Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN
19. Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai
20. Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
21. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum

Tabel 2.6
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026

NO	ASPEK/SASARAN INDIKATOR UTAMA	SATUAN	BASELINE	KET
			2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di daerah Yang dilaksanakan	%	76,00	
2	Persentase Potensi Konflik Sosial yang Diselesaikan	%	81	
3	Cakupan penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	%	31	
4	Persentase pendidikan politik pada kader partai politik	%	21	
5	Persentase organisasi kemasyarakatan yang terdaftar dan aktif	%	51	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKPSDM

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disisi lain masih ada juga indikator yang belum mencapai target. Sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinas sebagai perangkat daerah kabupaten/kota memiliki tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati atau wali kota, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai berikut :

- a. Tingkat Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dari tiga indikator terdapat satu indikator yang berhasil, tetapi belum mencapai target 80,01%, yaitu Nilai SAKIP BKPSDM.

- b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yaitu lambatnya ketersediaan permintaan dokumen perencanaan penunjang SAKIP yang dibutuhkan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Renja

Rancangan awal Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen penting yang mencerminkan visi dan misi sebuah organisasi atau instansi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Melalui review yang komprehensif terhadap rancangan ini, berbagai aspek yang berhubungan dengan strategi, program, dan kegiatan yang diusulkan dapat dievaluasi secara mendalam. Proses ini tidak hanya melibatkan analisis terhadap tujuan yang ingin dicapai, tetapi juga mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, keterkaitan antar program, serta dampak yang diharapkan bagi masyarakat. Dengan melakukan review, diharapkan dapat diidentifikasi potensi risiko dan tantangan yang mungkin muncul selama pelaksanaan rencana kerja.

Dalam melakukan review, penting untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk staf internal, mitra kerja, dan masyarakat. Pendapat dan masukan dari berbagai pihak akan memberikan perspektif yang lebih luas dan mendalam, sehingga rancangan awal Renja dapat disempurnakan. Diskusi yang konstruktif akan membantu menemukan solusi atas permasalahan yang mungkin timbul, serta memperkuat komitmen semua pihak terhadap pelaksanaan rencana kerja yang telah disepakati. Hal ini juga akan mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam setiap langkah yang diambil.

Setelah proses review dilakukan, hasilnya harus didokumentasikan dengan baik untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan Renja yang final. Penyusunan kembali rencana kerja berdasarkan hasil review ini akan memastikan bahwa semua tujuan, program, dan kegiatan yang diusulkan benar-benar relevan dan dapat dilaksanakan dengan efektif. Dengan demikian, diharapkan bahwa pelaksanaan Renja yang telah disempurnakan dapat memberikan dampak yang signifikan dan positif bagi masyarakat, serta mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan.

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia per program/kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.7
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 (T-C 31)

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana(Rp.000)	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Rekomendasi LHE SAKIP yang ditindak lanjuti	100%	33.800.884.995,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Rekomendasi LHE SAKIP yang ditindak lanjuti	100%	33.846.700.656,00	
		Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100%				Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100%		
		Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	87,00				Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	87,00		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan sesuai aturan dan tepat waktu	5 Dokumen	55.816.730,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan sesuai aturan dan tepat waktu	5 Dokumen	61.398.402,00 B	
		Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	5 Laporan				Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	5 Laporan		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BKPSDM	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	25.404.899,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BKPSDM	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	27.945.388,00	

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BKPSDM	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	30.411.831,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BKPSDM	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	33.453.014,00	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Keuangan yang Sesuai Dengan Perundang Undangan	4 Laporan	33.168.124.465,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Keuangan yang Sesuai Dengan Perundang Undangan	4 Laporan	33.179.777.575,00	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BKPSDM	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan	33.051.593.365,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BKPSDM	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan	33.051.593.365,00	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	BKPSDM	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	100.800.000,00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	BKPSDM	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	110.880.000,00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BKPSDM	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	15.731.100,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BKPSDM	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	17.304.210,00	
Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah surat dinas yang teradministrasi sesuai ketentuan dan terdistribusi sesuai tujuan	3500 Surat	176.495.600,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah surat dinas yang teradministrasi sesuai ketentuan dan terdistribusi sesuai tujuan	3500 Surat	195.130.160,00	
		Jumlah pelayanan yang terfasilitasi	10 Pelayanan				Jumlah pelayanan yang terfasilitasi	10 Pelayanan		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BKPSDM	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	10.900.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BKPSDM	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12.800.000,00	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	BKPSDM	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	10.750.000,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	BKPSDM	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12.000.000,00	

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BKPSDM	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	166 Laporan	154.845.600,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BKPSDM	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	166 Laporan	170.330.160,00	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah penambahan nilai aset	72000000 Rupiah	72.000.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah penambahan nilai aset	72000000 Rupiah	79.200.000,00	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BKPSDM	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	72.000.000,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BKPSDM	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	79.200.000,00	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah yang tersedia	12 Bulan	260.248.200,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah yang tersedia	12 Bulan	262.994.519,00	
		Jumlah jasa penunjang perkantoran yang disediakan	12 Bulan				Jumlah jasa penunjang perkantoran yang disediakan	12 Bulan		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BKPSDM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12.803.194,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BKPSDM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	14.083.513,00	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan	BKPSDM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Laporan	14.660.006,00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan	BKPSDM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Laporan	16.126.006,00	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BKPSDM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	232.785.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BKPSDM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	232.785.000,00	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah objek aset yang dikelola	227 Unit	68.200.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah objek aset yang dikelola	227 Unit	68.200.000,00	
		Jumlah total nilai aset	2042673316 Rupiah				Jumlah total nilai aset	2042673316 Rupiah		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BKPSDM	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit	68.200.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BKPSDM	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit	68.200.000,00	

Program Kepegawaian Daerah		Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi	71%	1.235.739.450,00	Program Kepegawaian Daerah		Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi	71%	1.235.739.450,00	
		Persentase ketersediaan data dan informasi ASN	81%				Persentase ketersediaan data dan informasi ASN	81%		
		Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai kompetensinya	51%				Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai kompetensinya	51%		
		Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	31%				Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	31%		
		Indeks Implementasi Manajemen NSPK ASN	74,00				Indeks Implementasi Manajemen NSPK ASN	74,00		
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		Jumlah Lowongan Kebutuhan Formasi yang terisi	700 Formasi	842.472.750,00	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		Jumlah Lowongan Kebutuhan Formasi yang terisi	700 Formasi	842.472.750,00	
		Jumlah Pegawai yang diberhentikan dan mendapatkan pangkat pengabdian	300 Orang				Jumlah Pegawai yang diberhentikan dan mendapatkan pangkat pengabdian	300 Orang		
		Jumlah Data Pegawai yang tersedia, update dan terbaru	6766 Orang				Jumlah Data Pegawai yang tersedia, update dan terbaru	6766 Orang		
		Jumlah Laporan Pemberian Layanan ASN yang dilakukan	1 Laporan				Jumlah Laporan Pemberian Layanan ASN yang dilakukan	1 Laporan		
Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	BKPSDM	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	12.000.350,00	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	BKPSDM	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	12.000.350,00	
Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	BKPSDM	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	700 Dokumen	765.512.600,00	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	BKPSDM	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	700 Dokumen	765.512.600,00	

Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	BKPSDM	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	300 Dokumen	23.219.900,00	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	BKPSDM	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	300 Dokumen	23.219.900,00	
Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	BKPSDM	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	2 Lembaga	6.519.900,00	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	BKPSDM	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	2 Lembaga	6.519.900,00	
Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	BKPSDM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	23.220.000,00	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	BKPSDM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	23.220.000,00	
Pengelolaan Data Kepegawaian	BKPSDM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1300 Dokumen	12.000.000,00	Pengelolaan Data Kepegawaian	BKPSDM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1300 Dokumen	12.000.000,00	
Mutasi dan Promosi ASN		Jumlah Pegawai yang dipindahkan sesuai kebutuhan dan syarat jabatan	145 Orang	230.358.650,00	Mutasi dan Promosi ASN		Jumlah Pegawai yang dipindahkan sesuai kebutuhan dan syarat jabatan	145 Orang	230.358.650,00	
		Jumlah Terlaksananya Mutasi dan Promosi ASN	5 Laporan				Jumlah Terlaksananya Mutasi dan Promosi ASN	5 Laporan		
Pengelolaan Mutasi ASN	BKPSDM	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	300 Dokumen	19.500.000,00	Pengelolaan Mutasi ASN	BKPSDM	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	300 Dokumen	19.500.000,00	
Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	BKPSDM	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	500 Dokumen	132.935.900,00	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	BKPSDM	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	500 Dokumen	132.935.900,00	
Pengelolaan Promosi ASN	BKPSDM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	60 Dokumen	77.922.750,00	Pengelolaan Promosi ASN	BKPSDM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	60 Dokumen	77.922.750,00	
Pengembangan Kompetensi ASN		Jumlah Pemetaan Kompetensi ASN	1 Laporan	70.523.450,00	Pengembangan Kompetensi ASN		Jumlah Pemetaan Kompetensi ASN	1 Laporan	70.523.450,00	
		Jumlah Laporan Peningkatan Kapasitas yang dilaksanakan	2 Laporan				Jumlah Laporan Peningkatan Kapasitas yang dilaksanakan	2 Laporan		

		Jumlah Laporan Peningkatan Kualifikasi ASN yang dilaksanakan	2 Laporan				Jumlah Laporan Peningkatan Kualifikasi ASN yang dilaksanakan	2 Laporan		
Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	BKPSDM	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	30 orang	32.340.150,00	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	BKPSDM	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	30 orang	32.340.150,00	
Pengelolaan Assessment Center	BKPSDM	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	1 Dokumen	3.050.000,00	Pengelolaan Assessment Center	BKPSDM	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	1 Dokumen	3.050.000,00	
Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	BKPSDM	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola	25 Orang	12.492.300,00	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	BKPSDM	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola	25 Orang	12.492.300,00	
Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	BKPSDM	Jumlah Fungsional ASN yang Dibina	350 Orang	22.641.000,00	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	BKPSDM	Jumlah Fungsional ASN yang Dibina	350 Orang	22.641.000,00	
Penilaian dan Evaluasi Kinerja ASN		Jumlah ASN yang mendapatkan penghargaan dan tunjangan kinerja	200 Orang	92.384.600,00	Penilaian dan Evaluasi Kinerja ASN		Jumlah ASN yang mendapatkan penghargaan dan tunjangan kinerja	200 Orang	92.384.600,00	
		Jumlah Penilaian Kinerja ASN	5 Laporan				Jumlah Penilaian Kinerja ASN	5 Laporan		
		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Disiplin ASN	2 Laporan				Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Disiplin ASN	2 Laporan		
		Jumlah Laporan Hasil Penyelesaian Kasus ASN yang diproses	3 Laporan				Jumlah Laporan Hasil Penyelesaian Kasus ASN yang diproses	3 Laporan		
Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	BKPSDM	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2 Dokumen	12.995.900,00	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	BKPSDM	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2 Dokumen	12.995.900,00	
Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	BKPSDM	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	6891 Dokumen	33.492.000,00	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	BKPSDM	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	6891 Dokumen	33.492.000,00	

**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
RENJA 2026**

Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	BKPSDM	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	200 Orang	12.000.000,00	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	BKPSDM	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	200 Orang	12.000.000,00	
Pembinaan Disiplin ASN	BKPSDM	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	3 Orang	11.490.600,00	Pembinaan Disiplin ASN	BKPSDM	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	3 Orang	11.490.600,00	
Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	BKPSDM	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	3 Laporan	21.405.900,00	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	BKPSDM	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	3 Laporan	21.405.900,00	
Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	BKPSDM	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	5 Dokumen	1.000.200,00	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	BKPSDM	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	5 Dokumen	1.000.200,00	
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia		Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	51%	774.006.400,00	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia		Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	51%	774.006.400,00	
		Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	21%				Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	21%		
		Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	81%				Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	81%		
Pengembangan Kompetensi Teknis		Jumlah Laporan Pengembangan Kompetensi Teknis yang dilaksanakan	1 Laporan	13.210.300,00	Pengembangan Kompetensi Teknis		Jumlah Laporan Pengembangan Kompetensi Teknis yang dilaksanakan	1 Laporan	13.210.300,00	
		Jumlah Dokumen kebijakan pengembangan kompetensi yang disusun	1 Dokumen				Jumlah Dokumen kebijakan pengembangan kompetensi yang disusun	1 Dokumen		

Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	BKPSDM	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang DisusunJumlah Dokumen Pengembangan Kompetensi	1 Dokumen	1.050.000,00	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	BKPSDM	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang DisusunJumlah Dokumen Pengembangan Kompetensi	1 Dokumen	1.050.000,00	
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	BKPSDM	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	10 Orang	12.160.300,00	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	BKPSDM	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	10 Orang	12.160.300,00	
Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		Jumlah Laporan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1 Laporan	760.796.100,00	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		Jumlah Laporan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1 Laporan	760.796.100,00	
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	BKPSDM	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	14 Laporan	760.796.100,00	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	BKPSDM	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	14 Laporan	760.796.100,00	
JUMLAH				35.810.630.845,00					35.856.446.506,00	

2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah lain dan bukan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Namun dalam proses ini Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain. Penelaahan usulan dari masyarakat juga dilakukan pada pelaksanaan forum Perangkat Daerah sebelum dilaksanakannya Musrenbang RKPD Kabupaten.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah sangat penting untuk memastikan sinkronisasi antara perencanaan di tingkat daerah dan prioritas pembangunan nasional. Kebijakan nasional yang tertuang dalam dokumen strategis seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), kebijakan fiskal nasional, serta instruksi dan arahan presiden menjadi pedoman utama dalam proses perencanaan di daerah. Renja perangkat daerah harus merujuk dan menyesuaikan diri dengan arahan kebijakan nasional tersebut agar tujuan pembangunan daerah tidak terpisah dari kerangka besar pembangunan nasional.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Padang Pariaman merupakan sebuah Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM maupun SDGs. Kebijakan nasional yang diampu oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan RKPD yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Padang Pariaman.

Kebijakan nasional yang relevan dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kebijakan nasional berperan sebagai panduan utama dalam merumuskan arah pembangunan daerah, termasuk Dinas, agar selaras dengan visi dan misi pembangunan nasional. Dengan demikian, setiap program dan kegiatan yang direncanakan pada tingkat Dinas perlu merujuk pada berbagai kebijakan, rencana, dan target yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Salah satu kebijakan nasional yang menjadi acuan penting dalam penyusunan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah RPJMN yang menetapkan prioritas pembangunan selama lima tahun. RPJMN menguraikan program prioritas di berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi, yang harus diimplementasikan di tingkat daerah. Renja perangkat daerah harus menafsirkan prioritas nasional ini ke dalam konteks lokal dengan menyesuaikan program dan kegiatan yang relevan dengan kondisi serta kebutuhan daerah, namun tetap mengacu pada tujuan nasional.

Telaahan terhadap kebijakan nasional dalam menyusun Renja perangkat daerah bertujuan untuk menciptakan sinergi antara perencanaan daerah dan nasional. Hal ini memastikan bahwa upaya pembangunan di daerah mendukung visi dan misi nasional, serta memperkuat harmonisasi perencanaan pembangunan lintas sektor dan wilayah. Dengan demikian, pembangunan daerah tidak

hanya memberikan dampak lokal yang positif, tetapi juga mendukung pencapaian target pembangunan Indonesia secara keseluruhan

Berikut adalah sinkronisasi Visi dan Misi RPJMN Tahun 2025-2029, Provinsi Sumatera Barat 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029.

Tabel 3.1

Visi dan Misi RPJMN Tahun 2025-2029, Provinsi Sumatera Barat 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029

No	Visi RPJMN Tahun 2025-2029	Visi Misi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029	Visi Misi RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029
	Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045	Sumatera Barat Madani yang Maju dan Berkeadilan	Padang Pariaman Maju dan Sejahtera
1.	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan berintegritas
2.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru	Lumbung Pangan Nasional Dan Ekonomi Berkelanjutan	Menciptakan SDM yang berkualitas dan berdaya saing
3	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Nagari/Desa Sebagai Basis Kemajuan	Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Inklusif, Maju dan Merata
4	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas	Sumatera Barat Pusat Perdagangan Dan Bisnis Sumatera Bagian Barat	Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan
5	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	Membangun Infrastruktur Berkeadilan Dan Siap Tanggap Bencana	Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya

No	Visi RPJMN Tahun 2025-2029	Visi Misi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029	Visi Misi RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029
	Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045	Sumatera Barat Madani yang Maju dan Berkeadilan	Padang Pariaman Maju dan Sejahtera
6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	Membangun Kehidupan Beradat Dan Berbudaya Berbasis Agama, Kearifan Lokal Melalui Dukungan Keluarga Yang Berkualitas	
7	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Tingkatkan Daya Saing Pariwisata Dan Akselerasi Ekonomi Kreatif Untuk UMKM	
8	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Tata Kelola Pemerintahan Bersih Dan Pelayanan Publik Yang Efektif	

Berikut adalah sinkronisasi pembangunan Prioritas Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman dengan Prioritas Nasional dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026:

Tabel 3.2
Sinkronisasi Pembangunan Prioritas Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman dengan Prioritas Nasional dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026

No	Agenda/Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026	Prioritas Pembangunan RKPD Padang Pariaman Tahun 2026
	Tema	Tema	Tema
1.	Prioritas Nasional 1: Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi dan hak azazi manusia	Prioritas 2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat	Prioritas 1. Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama berlandaskan "adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah"
2.	Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan	Prioritas 3. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Prioritas 4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industry kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital	Prioritas 3. Penguatan Ketahanan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkeadilan

No	Agenda/Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026	Prioritas Pembangunan RKPD Padang Pariaman Tahun 2026
Tema		Tema	Tema
	ekonomi biru	Prioritas 5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya Saing kepariwisataan Prioritas 6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	
3.	Prioritas Nasional 3: Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur	Prioritas 3. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Prioritas 5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya Saing kepariwisataan Prioritas 6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	Prioritas 2. Penguatan Infrastruktur Publik yang ramah lingkungan dengan memperhatikan tata ruang wilayah Prioritas 6. Peningkatan kualitas pelayanan dasar
4.	Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Prioritas 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Prioritas 2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	Prioritas 4. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing dan Berketahanan Sosial
5.	Prioritas Nasional 5: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	Prioritas 3. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Prioritas 4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital	Prioritas 3. Penguatan Ketahanan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkeadilan
6.	Prioritas Nasional 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan	Prioritas 3. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Prioritas 3. Penguatan Ketahanan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkeadilan

No	Agenda/Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026	Prioritas Pembangunan RKPD Padang Pariaman Tahun 2026
	Tema	Tema	Tema
	kemiskinan	Prioritas 4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital Prioritas 6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	
7.	Prioritas Nasional 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba	Prioritas 7. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Prioritas 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel
8.	Prioritas Nasional 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Prioritas 2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	Prioritas 1. Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama berlandaskan "adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah disusun sebagai pedoman untuk mencapai tujuan pembangunan daerah yang selaras dengan visi dan misi pemerintah. Tujuan utama Renja ini adalah untuk memastikan bahwa semua program dan kegiatan yang direncanakan dapat berkontribusi secara nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas layanan publik. Dengan menetapkan tujuan yang jelas, setiap perangkat daerah dapat lebih fokus dalam melaksanakan tugas dan fungsi mereka, serta berkolaborasi secara efektif untuk mencapai hasil yang diharapkan.

Sasaran Renja yang ditetapkan harus spesifik, terukur, dan realistis, serta dapat dicapai dalam jangka waktu tertentu. Sasaran ini berfungsi sebagai tolok ukur untuk mengevaluasi kinerja setiap perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Selain itu,

dengan adanya sasaran yang jelas, perangkat daerah dapat lebih mudah mengidentifikasi kebutuhan dan tantangan yang ada, sehingga langkah-langkah strategis yang tepat dapat diambil untuk mengatasinya. Penetapan sasaran ini juga penting untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, sehingga setiap inisiatif yang diambil dapat lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Dalam proses pelaksanaan Renja, penting bagi perangkat daerah untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hal ini akan memungkinkan identifikasi terhadap hambatan dan peluang yang muncul selama pelaksanaan, sehingga langkah perbaikan dapat segera diambil. Dengan demikian, Renja tidak hanya menjadi dokumen statis, tetapi juga menjadi alat yang dinamis untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan pembangunan daerah, serta memastikan bahwa hasil yang dicapai sesuai dengan harapan masyarakat.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi. Tujuan dicanangkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan dan sasaran Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2026 adalah :

A. Tujuan

Mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten padang Pariaman yang telah ditetapkan, maka Tujuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026 adalah **"Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Terwujudnya Profesionalitas ASN"** dengan indikator tujuan **"Indeks Profesionalisme ASN, Indeks Sistem Merit dan Nilai SAKIP Pemerintah Daerah."**

B. Sasaran

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Tujuan, Sasaran, Indikator Tujuan, Indikator Sasaran dan Target Kinerja
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026

Visi	Misi	Tujuan OPD	Indikator Tujuan OPD	Target 2026	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target 2026
Padang Pariaman Maju dan Sejahtera	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah.	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	72,19	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	80,02
		Terwujudnya profesionalitas ASN	Indeks Profesionalisme ASN	73,00	Meningkatkan Profesionalisme ASN	Nilai Aspek Kualifikasi ASN	22,00
						Nilai Aspek Kinerja ASN	26,00
						Nilai Aspek Kompetensi ASN	29,00
						Nilai Aspek Disiplin ASN	5,00
			Indeks Sistem Merit	250	Meningkatkan Kualitas Manajemen ASN	Nilai Aspek Perencanaan Kebutuhan	49,00
						Nilai Aspek Pengadaan ASN	41,00
						Nilai Aspek Perlindungan dan Pelayanan	7,00
						Nilai Aspek Sistem Informasi	19,00
						Nilai Aspek Pengembangan Karir	41,00
						Nilai Aspek Promosi Asn sesuai Kriteria	18,00
						Nilai Aspek Manajemen Kinerja	47,00
						Nilai aspek penggajian, pengharagaan dan Disiplin	38,00

3.3 Program dan Kegiatan

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026 sebagai berikut :

1. Pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Padang Pariaman,

Visi dan misi kepala daerah adalah panduan utama bagi semua perangkat daerah, termasuk dinas, dalam menyusun program dan kegiatan. Visi menggambarkan arah jangka panjang yang ingin dicapai, sedangkan misi menjelaskan langkah-langkah strategis yang harus diambil untuk mencapai visi tersebut. Misalnya, jika visi kepala daerah adalah **"Padang Pariaman Maju dan Sejahtera"** maka program dinas harus fokus pada pengembangan sektor-sektor strategis seperti pembangunan infrastruktur jalan, irigasi, dan sarana publik yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

Misi kepala daerah yang mungkin menitikberatkan pada peningkatan layanan publik juga harus direspons oleh dinas dengan merancang program yang meningkatkan akses dan kualitas pelayanan, baik itu dalam bidang kesehatan, pendidikan, atau administrasi publik. Dalam hal ini, dinas perlu melakukan penyelarasan secara terus-menerus dengan prioritas yang ditetapkan dalam visi dan misi kepala daerah, maka program, kegiatan dan sub kegiatan mengacu kepada Misi 1 yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 dan memastikan bahwa setiap program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mendukung visi misi Kepala Daerah yaitu mewujudkan Padang Pariaman Maju dan Sejahtera.

2. Pencapaian SDGs

Sebagai bagian dari komitmen, Kabupaten Padang Pariaman juga perlu memperhatikan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). SDGs mencakup 17 tujuan yang berfokus pada pengentasan kemiskinan, perlindungan lingkungan, dan pencapaian kesejahteraan untuk semua. Dalam konteks ini, program dan kegiatan Dinas tahun 2026 harus dirancang untuk mendukung beberapa tujuan SDGs, seperti meningkatkan kualitas pendidikan (Goal 4), memastikan akses air bersih dan sanitasi (Goal 6), serta menciptakan pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi (Goal 8). Setiap program yang dirancang perlu mempertimbangkan bagaimana dampaknya terhadap target SDGs di Kabupaten Padang Pariaman.

Program dan kegiatan dinas harus disusun sedemikian rupa agar dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian SDGs ini, baik melalui peningkatan kesejahteraan sosial, ekonomi berkelanjutan, maupun perlindungan lingkungan.

3. Pengentasan Kemiskinan

Pengentasan kemiskinan adalah salah satu fokus utama pemerintah daerah yang harus diprioritaskan dalam perencanaan program dan kegiatan. Program yang dirancang oleh Dinas harus berkontribusi langsung terhadap upaya pengurangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Padang Pariaman. Ini dapat berupa program-program yang mendukung pemberdayaan masyarakat miskin, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta bantuan sosial yang terarah. Selain itu, pengembangan program ekonomi produktif seperti pemberdayaan UMKM dan pelatihan keterampilan kerja juga menjadi faktor penting dalam strategi pengentasan kemiskinan di daerah.

Pengentasan kemiskinan merupakan prioritas utama yang harus dipertimbangkan dalam setiap perencanaan di tingkat daerah, termasuk dalam menyusun program dinas. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Padang Pariaman harus dihadapi melalui program yang langsung menysasar kebutuhan masyarakat miskin. Beberapa contoh program yang relevan adalah:

- **Pemberdayaan ekonomi masyarakat:** Program pelatihan keterampilan bagi masyarakat miskin untuk meningkatkan produktivitas dan kemampuan berwirausaha, yang kemudian diikuti dengan pemberian akses modal dan dukungan pasar.
- **Bantuan sosial terarah:** Penyusunan program bantuan sosial yang lebih tepat sasaran, seperti bantuan tunai atau bantuan pendidikan bagi keluarga miskin, sehingga dapat langsung meringankan beban ekonomi mereka.
- **Pengembangan infrastruktur yang mendukung ekonomi masyarakat:** Pembangunan infrastruktur di wilayah-wilayah yang tertinggal, seperti pembangunan jalan, jembatan, dan irigasi, untuk meningkatkan akses masyarakat miskin ke pasar dan layanan publik. Pengentasan kemiskinan tidak hanya membantu masyarakat secara langsung tetapi juga berkontribusi pada stabilitas ekonomi dan sosial daerah.

4. Pencapaian NSPK dan SPM

Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) serta Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah instrumen yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk memastikan kualitas pelayanan dasar di daerah. Dinas harus memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dirumuskan di tahun 2026 telah memenuhi dan mematuhi NSPK dan SPM yang berlaku. Pencapaian NSPK dan SPM terkait dengan sektor-sektor layanan dasar, seperti

kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, dan sosial. Program-program Dinas harus diarahkan untuk memenuhi standar tersebut, seperti memastikan tersedianya layanan kesehatan dasar yang berkualitas di seluruh wilayah atau memastikan akses pendidikan yang merata bagi semua anak usia sekolah di Kabupaten Padang Pariaman.

5. Pendayagunaan Potensi Ekonomi daerah

Pendayagunaan potensi ekonomi lokal adalah faktor kunci dalam menyusun program yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Padang Pariaman. Setiap program dan kegiatan yang dirumuskan harus didasarkan pada potensi daerah, baik di sektor pertanian, pariwisata, perikanan, maupun sektor lainnya yang memiliki peluang untuk berkembang. Contohnya, jika Kabupaten Padang Pariaman memiliki potensi besar di sektor pariwisata alam, maka program-program yang dirancang harus mencakup pengembangan destinasi wisata, infrastruktur pendukung pariwisata, dan peningkatan kapasitas masyarakat lokal sebagai pelaku ekonomi di sektor tersebut. Begitu juga dengan sektor agribisnis dan perikanan, yang bisa dikembangkan melalui program peningkatan teknologi pertanian, akses pasar, dan dukungan modal bagi petani dan nelayan lokal.

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor di atas, perencanaan program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Padang Pariaman untuk tahun 2026 dapat disusun secara strategis, efektif, dan berdampak nyata. Ini memastikan bahwa program yang dirancang tidak hanya memenuhi kebutuhan lokal tetapi juga sejalan dengan kebijakan nasional dan tujuan pembangunan global, serta berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan

- b. Berdasarkan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026 maka dirumuskanlah rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan secara rinci pada tabel di bawah ini :

**Tabel 3.4 (TC 33)
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
-1				-2		-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
5					URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				31.102.037.680,00				35.856.446.506,00
	3				KEPEGAWAIAN								
5	3	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Rekomendasi LHE SAKIP yang ditindak lanjuti	BKPSDM	100%	30.502.090.414,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		100%	33.846.700.656,00
						Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti		100%		Dana Alokasi Umum (DAU)		100%	
						Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)		87,00		Dana Alokasi Umum (DAU)		87,00	
5	3	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan sesuai aturan dan tepat waktu	BKPSDM	5 Dokumen	27.348.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		5 Dokumen	61.398.402,00
						Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	BKPSDM	5 Laporan		Dana Alokasi Umum (DAU)		5 Laporan	

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
5	3	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BKPSDM	5 Dokumen	12.050.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		5 Dokumen	27.945.388,00
5	3	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BKPSDM	5 Laporan	15.298.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		5 Laporan	33.453.014,00
5	3	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan yang Sesuai Dengan Perundang Undangan	BKPSDM	4 Laporan	30.108.329.094,96	Dana Alokasi Umum (DAU)		4 Laporan	33.179.777.575,00
5	3	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	BKPSDM	45 Orang/bulan	30.000.000.094,96	Dana Alokasi Umum (DAU)		45 Orang/bulan	33.051.593.365,00
5	3	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	BKPSDM	12 Dokumen	100.800.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		12 Dokumen	110.880.000,00
5	3	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BKPSDM	4 Laporan	7.529.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		4 Laporan	17.304.210,00
5	3	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan yang terfasilitasi	BKPSDM	3500 Surat	117.014.280,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		3500 Surat	195.130.160,00
				Jumlah surat dinas yang teradministrasi sesuai ketentuan dan terdistribusi sesuai tujuan		10 Pelayanan		Dana Alokasi Umum (DAU)		10 Pelayanan			

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
5	3	1	2.06	1	Penyediaan Jasa Komponen Instansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah pelayanan yang terfasilitasi	BKPSDM	12 Paket	10.900.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		12 Paket	12.800.000,00
5	3	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	BKPSDM	12 Laporan	5.375.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		12 Laporan	12.000.000,00
5	3	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BKPSDM	12 Laporan	100.739.280,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		12 Laporan	170.330.160,00
5	3	1	2.07		<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	Jumlah penambahan nilai aset	BKPSDM	72.000.000 Rupiah	50.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		72.000.000 Rupiah	79.200.000,00
5	3	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	BKPSDM	5 Unit	50.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		5 Unit	50.000.000,00
5	3	1	2.08		<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah yang tersedia</i>	BKPSDM	12 Bulan	172.629.042,04	Dana Alokasi Umum (DAU)		12 Bulan	262.994.519,00
						<i>Jumlah jasa penunjang perkantoran yang disediakan</i>		12 Bulan		Dana Alokasi Umum (DAU)		12 Bulan	
5	3	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BKPSDM	12 Laporan	6.731.362,04	Dana Alokasi Umum (DAU)		12 Laporan	14.083.513,00

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
5	3	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	BKPSDM	5 Laporan	14.660.006,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		5 Laporan	16.126.006,00
5	3	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	BKPSDM	12 Laporan	151.237.680,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		12 Laporan	232.785.000,00
5	3	1	2.09		<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Jumlah objek aset yang terkelola	BKPSDM	227 Unit	26.769.997,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		227 Unit	68.200.000,00
						Jumlah total nilai aset		2.042.673.316 Rupiah		Dana Alokasi Umum (DAU)		2.042.673.316 Rupiah	
5	3	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dibayarkan Pajaknya	BKPSDM	4 Unit	26.769.997,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		4 Unit	68.200.000,00
5	3	2			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi	BKPSDM	71%	500.137.366,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		71%	1.235.739.450,00
						Persentase ketersediaan data dan informasi ASN		81%		Dana Alokasi Umum (DAU)		81%	
						Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai kompetensinya		51%		Dana Alokasi Umum (DAU)		51%	

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)		31%		Dana Alokasi Umum (DAU)		31%	
						Indeks Implementasi Manajemen NSPK ASN		74,00		Dana Alokasi Umum (DAU)		74,00	
5	3	2	2.01		Pengadaan, Pemberhentian Dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Lowongan Kebutuhan Formasi yang terisi	BKPSDM	700 Formasi	276.325.750,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		700 Formasi	842.472.750,00
						Jumlah Pegawai yang diberhentikan dan mendapatkan pengkat pengabdian		300 Orang		Dana Alokasi Umum (DAU)		300 Orang	
						Jumlah Data Pegawai yang tersedia, update dan terbaru		6766 Orang		Dana Alokasi Umum (DAU)		6766 Orang	
						Jumlah Laporan Pemberian Layanan ASN yang dilakukan		1 Laporan		Dana Alokasi Umum (DAU)		1 Laporan	
5	3	2	2.01	2	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	BKPSDM	1 Dokumen	12.000.350,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 Dokumen	12.000.350,00
5	3	2	2.01	3	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	BKPSDM	700 Dokumen	205.870.500,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		700 Dokumen	765.512.600,00
5	3	2	2.01	6	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	BKPSDM	300 Dokumen	23.219.900,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		300 Dokumen	23.219.900,00

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
5	3	2	2.01	8	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	BKPSDM	2 Lembaga	15.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		2 Lembaga	6.519.900,00
5	3	2	2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	BKPSDM	1 Dokumen	23.220.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 Dokumen	23.220.000,00
5	3	2	2.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	BKPSDM	1500 Dokumen	12.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		1500 Dokumen	12.000.000,00
5	3	2	2.02		Mutasi Dan Promosi ASN	Jumlah Pegawai yang dipindahkan sesuai kebutuhan dan syarat jabatan	BKPSDM	145 Orang	127.067.786,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		145 Orang	230.358.650,00
						Jumlah Terlaksananya Mutasi dan Promosi ASN		5 Laporan		Dana Alokasi Umum (DAU)		5 Laporan	
5	3	2	2.02	1	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	BKPSDM	500 Dokumen	19.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		500 Dokumen	19.500.000,00
5	3	2	2.02	3	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	BKPSDM	6 Dokumen	53.571.385,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		6 Dokumen	132.935.900,00
5	3	2	2.02	4	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	BKPSDM	60 Dokumen	53.996.401,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		60 Dokumen	77.922.750,00
5	3	2	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah Pemetaan Kompetensi ASN	BKPSDM	2 Laporan	30.765.230,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		2 Laporan	70.523.450,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						Jumlah Laporan Peningkatan Kapasitas yang dilaksanakan		1 Laporan		Dana Alokasi Umum (DAU)		1 Laporan	
						Jumlah Laporan Peningkatan Kualifikasi ASN yang dilaksanakan		2 Laporan		Dana Alokasi Umum (DAU)		2 Laporan	
5	3	2	2.03	1	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang meningkat Kapasitasnya	BKPSDM	25 Orang	21.515.250,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		25 Orang	32.340.250,00
5	3	2	2.03	2	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assesment Center	BKPSDM	1 Dokumen	1.360.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 Dokumen	3.050.000,00
5	3	2	2.03	4	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Pendidikan Lanjutan	BKPSDM	25 Orang	30.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		25 Orang	12.492.300,00
5	3	2	2.03	13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	BKPSDM	350 Orang	7.859.980,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		350 Orang	22.641.000,00
5	3	2	2.04		Penilaian Dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah ASN yang mendapatkan penghargaan dan tunjangan kinerja	BKPSDM	200 Orang	65.978.600,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		200 Orang	92.384.600,00
						Jumlah Penilaian Kinerja ASN		5 Laporan		Dana Alokasi Umum (DAU)		5 Laporan	
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Disiplin ASN		2 Laporan		Dana Alokasi Umum (DAU)		2 Laporan	
						Jumlah Laporan Hasil Penyelesaian Kasus ASN yang diproses		3 Laporan		Dana Alokasi Umum (DAU)		3 Laporan	

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
5	3	2	2.04	1	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	BKPSDM	2 Dokumen	15.795.900,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		2 Dokumen	12.995.900,00
5	3	2	2.04	3	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	BKPSDM	7128 Dokumen	14.360.500,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		7128 Dokumen	33.492.000,00
5	3	2	2.04	4	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang diberi Penghargaan	BKPSDM	200 Orang	12.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		200 Orang	12.000.000,00
5	3	2	2.04	7	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	BKPSDM	100 Orang	300.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		100 Orang	11.490.600,00
5	3	2	2.04	8	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	BKPSDM	3 Laporan	23.507.200,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		3 Laporan	21.405.900,00
5	3	2	2.04	9	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	BKPSDM	5 Dokumen	15.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		5 Dokumen	1.000.200,00
5	4				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN								
5	4	2			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	BKPSDM	51%	99.809.900,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		51%	774.006.400,00
						Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)		21%		Dana Alokasi Umum (DAU)		21%	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)		81%		Dana Alokasi Umum (DAU)		81%	
5	4	2	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah Laporan Pengembangan Kompetensi Teknis yang dilaksanakan	BKPSDM	1 Laporan	26.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 Laporan	13.210.300,00
						Jumlah Dokumen kebijakan pengembangan kompetensi yang disusun		1 Dokumen		Dana Alokasi Umum (DAU)		1 Dokumen	
5	4	2	2.01	1	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang disusun	BKPSDM	1 Dokumen	15.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 Dokumen	1.050.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
5	4	2	2.01	3	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	BKPSDM	10 Orang	11.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		10 Orang	12.160.300,00
5	4	2	2.02		<i>Sertifikasi, kelembagaan, kompetensi manajerial dan fungsional</i>	Jumlah ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	BKPSDM	1 Laporan	99.783.900,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 Laporan	760.796.100,00
5	4	2	2.02	7	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	BKPSDM	14 Laporan	99.783.900,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		14 Laporan	760.796.100,00
JUMLAH									31.102.037.680,00				35.856.446.506,00

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KAB. PADANG PARIAMAN TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSIRA OPD	REALISASI RENCANA RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKSIAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KEHANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKSIAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PACU INDIKATOR (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PROMOTIAS			TARGET	PACU INDIKATOR (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					31.102.037.888,00								33.856.446.508,00		
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					31.102.037.888,00								33.856.446.508,00		
5.03		KEPEGAWAIAN					31.802.227.788,00								33.882.440.108,00		
1.	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					30.502.050.414,00							-	33.846.700.858,00		
		[Meningkatkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah]	Perubahan rekomendasi LME SAKSI yang ditindaklanjuti (%) Perubahan Temuan BPK yang ditindak lanjuti Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	100 91,00	100 81,00	100 86,00	100 87,00	30.502.050.414,00	-	-	-	-	-	-	33.846.700.858,00	-	
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan sesuai aturan dan tepat waktu Jumlah laporan capaian kinerja dan indikator realisasi kinerja perangkat daerah	-			5 Dokumen 5 Laporan	27.348.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Beraki, Akuntabel Serta Berkeadilan 5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya	-	-	61.398.402,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	12.050.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Beraki, Akuntabel Serta Berkeadilan 5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya	-		27.345.388,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	

**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
RENJA 2026**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSIRA QMD	REALISASI CAPAIAN RENJA QMD TAHUN 2024	PRAKSIAN CAPAIAN TARGET RENJA QMD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KEHANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKSIAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PACU INDIKATOR (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITY			TARGET	PACU INDIKATOR (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	15.298.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tula Kriteria Pemertintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya	-		33.453.014,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan yang Sesuai Dengan Perundang Undangan	-			4 Laporan	30.108.329.094,98			-	Mewujudkan Tula Kriteria Pemertintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya	-	-	33.179.777.575,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				45 Orang/bulan	30.000.000.094,98	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tula Kriteria Pemertintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya	-		33.051.593.385,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
RENJA 2026**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSIHA Q1'D	REALISASI CAPAIAN RENSIHA Q1'D TAHUN 2024	PRAKSIAN CAPAIAN TARGET RENJA Q1'D TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKSIAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PRAKSIAN DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRAKSIAN					
											NASIONAL		DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	100.880.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Berakut, Akutabel Serta Berkualitas 5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya	-		110.880.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				4 Laporan	7.529.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Berakut, Akutabel Serta Berkualitas 5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya	-		17.304.210,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Peningkatan Daerah	Jumlah pelayanan yang terfasilitasi Jumlah surat dinas yang teradministrasi sesuai/ kelembagaan dan terfasilitasi sesuai tujuan	-			10 Pelayanan 3500 Surat	117.014.280,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Berakut, Akutabel Serta Berkualitas 5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya	-	-	195.130.180,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
RENJA 2026**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSIRA Q1'D	REALISASI CAPAIAN RENJA Q1'D TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA Q1'D TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASAHAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PEMERINTAH DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITY			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	10.900.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Berarah, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya	-		12.800.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Laporan	5.375.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Berarah, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya	-		12.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	100.739.280,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Berarah, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya	-		170.330.180,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
RENJA 2026**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSIMA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PEMANCAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instansi Lain/Perencanaan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	10.900.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kantor Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Berah, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Halghus, Harmonis dan Berbudaya	-		12.800.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Laporan	5.375.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kantor Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Berah, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Halghus, Harmonis dan Berbudaya	-		12.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	100.739.280,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kantor Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Berah, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Halghus, Harmonis dan Berbudaya	-		170.330.180,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
RENJA 2026**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSIRA QMD	REALISASI CAPAIAN RENJA QMD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA QMD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KEHANCAKUAN PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PEMERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Sifat Menyurat				12 Laporan	6.731.382,04	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Berah, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Mewujud kan Kehidupan Sosial yang Halghus, Harmonis dan Berbudaya	-		14.083.513,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Laporan	14.860.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Berah, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Mewujud kan Kehidupan Sosial yang Halghus, Harmonis dan Berbudaya	-		16.126.006,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	151.237.680,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Berah, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Mewujud kan Kehidupan Sosial yang Halghus, Harmonis dan Berbudaya	-		232.785.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
RENJA 2026**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RESTRASI OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PEHANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PACU INDIKATOR (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITYAS			TARGET	PACU INDIKATOR (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Sarang Milk Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah total nilai aset Jumlah objek aset yang berkecil	-			2042673316 Rupiah 227 Unit	26.789.997,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Berarah, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya	-	-	68.200.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	26.789.997,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Berarah, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya	-		68.200.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
2.	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH						506.137.366,00						-	1.235.739.450,00	
		-	-	-	-	-	-	506.137.366,00	-	-	-	-	-	-	1.235.739.450,00	-

**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
RENJA 2026**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSIRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKSIAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KEHANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKSIAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PENGANGKAT DAERAH PENGANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITYAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Data Pegawai yang terdaftar, update dan terbeban Jumlah Laporan Pembelian Layanan ASN yang dilakukan Jumlah Lowongan Kebutuhan Formal yang terisi Jumlah Pegawai yang diberhentikan dan mendapatkan pengkal pengabdian	-			8788 Orang 1 Laporan 700 Formal 300 Orang	278.325.750,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, produksi olahraga, kelestarian gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Berarah, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	842.472.750,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				1 Dokumen	12.000.350,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, produksi olahraga, kelestarian gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Berarah, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		12.000.350,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK														

**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
RENJA 2026**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSIRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KEHANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PRAKIRAN DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PACU INDIKATOR (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITY			TARGET	PACU INDIKATOR (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Realisasi Pengabdian PNS dan PPPK				700 Dokumen	205.870.500,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, produksi di bidang, keadilan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah di bidang.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Berakutabel Serta Berkualitas 5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		785.512.800,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan														
			Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan				300 Dokumen	23.219.900,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, produksi di bidang, keadilan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah di bidang.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Berakutabel Serta Berkualitas 5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		23.219.900,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN														

**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
RENJA 2026**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSIMA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PEHANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PACU INDIKATOR (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PISORHAS			TARGET	PACU INDIKATOR (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi				2 Lembaga	15.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, produksi olahraga, kesejahteraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangdang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Berarah, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	8.519.900,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5.03.02.2.01.0010		Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	23.220.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, produksi olahraga, kesejahteraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangdang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Berarah, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	23.220.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5.03.02.2.01.0011		Pengelolaan Data Kepegawaian														

**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
RENJA 2026**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENJATA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian				1500 Dokumen	12.000.000,00	Kab. Padang Parlaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Hamonis dan Berbudaya	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		12.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah Pegawai yang dipindahkan sesuai kebutuhan dan syarat jabatan Jumlah Terlaksananya Mutasi dan Promosi ASN	-			145 Orang 5 Laporan	127.067.786,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Hamonis dan Berbudaya	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	230.358.650,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN														

**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
RENJA 2026**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRAS OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2028	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah				500 Dokumen	19.500.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kali/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen- yanggungan disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		19.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.02.0002		Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN														
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				6 Dokumen	53.571.385,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kali/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen- yanggungan disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		132.935.900,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.02.0003		Pengelolaan Promosi ASN														

**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
RENJA 2026**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				60 Dokumen	53.996.401,00	Kab. Padang Parlaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyang- gand disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		77.922.750,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah Pemetaan Kompetensi ASN Jumlah Laporan Peningkatan Kapasitas yang dilaksanakan Jumlah Laporan Peningkatan Kualifikasi ASN yang dilaksanakan	-			2 Laporan 1 Laporan 2 Laporan	30.765.230,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyang- gand disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	70.523.450,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN														

**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
RENJA 2026**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK BARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya				25 Orang	21.515.250,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penanganan disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		32.340.150,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0002	Pengelolaan Assessment Center														
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center				1 Dokumen	1.360.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penanganan disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		3.050.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN														

**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
RENJA 2026**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan				25 Orang	30.000,00	Kab. Padang Paripaman, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangdang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Mewujud kan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		12.492.300,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN														
			Jumlah ASN Fungsional/ yang Dibina				350 Orang	7.859.980,00	Kab. Padang Paripaman, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangdang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Mewujud kan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		22.641.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
RENJA 2026**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK BARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2028	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Laporan Hasil Penyelesaian Kasus ASN yang diproses Jumlah Penilaian Kinerja ASN Jumlah ASN yang mendapatkan penghargaan dan tunjangan kinerja Jumlah Dokumen Kebijakan Kepegawaian yang disusun Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Disiplin ASN	-			3 Laporan 5 Laporan 200 Orang 1 Dokumen 2 Laporan	65.978.600,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen- yangang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	92.384.600,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0001	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				2 Dokumen	15.795.900,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen- yangang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		12.995.900,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0003	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur														

**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
RENJA 2026**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RESTRATA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SABARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				7128 Laporan	14.360.500,00	Kab. Padang Parlaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangandang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		33.492.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.04.0004		Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai														
			Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan				200 Orang	12.000.000,00	Kab. Padang Parlaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangandang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		12.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.04.0007		Pembinaan Disiplin ASN														

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
RENJA 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SABARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				100 Orang	300.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		11.490.600,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN														
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				3 Laporan	23.507.200,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		21.405.900,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai														

**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
RENJA 2026**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSITRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Proses Izin Penceraian Pegawai yang Dilayani				5 Dokumen	15.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		1.000.200,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						88.309.800,00							774.006.400,00	
1.	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						88.309.800,00						-	774.006.400,00	
	5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah Laporan Pengembangan Kompetensi/ Teknis yang dilaksanakan Jumlah Dokumen kebijakan pengembangan kompetensi yang disusun	-			1 Laporan 1 Dokumen	26.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya	-	-	13.210.300,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.04.02.2.01.0001		Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum														

**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
RENJA 2026**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TANGGAP AKHIR PERIODE RENSIRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TANGGAP RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KEANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU KENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TANGGAP 2026	PACU INDIKATOR (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITY			TANGGAP	PACU INDIKATOR (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kegiatan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Diusai				1 Dokumen	15.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya	-		1.550.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum														
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi				10 Orang	11.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya	-		12.160.300,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah Laporan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	-			1 Laporan	99.783.900,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya	-	-	760.796.100,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan														

**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
RENJA 2026**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SABARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Pejabat				14 Laporan	99.783.900,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya	-		760.796.100,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	JUMLAH							31.102.037.880,00							35.356.448.508,00		

BAB V PENUTUP

Dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2026 ini, beberapa catatan penting perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan berbagai kegiatan serta pengelolaan anggaran yang tersedia. Pertama, keberhasilan program dan kegiatan yang direncanakan sangat bergantung pada ketersediaan anggaran yang memadai serta pemanfaatan sumber daya secara efisien. Oleh karena itu, koordinasi yang baik dengan pihak terkait untuk memastikan alokasi anggaran yang optimal harus terus ditingkatkan.

Untuk memastikan seluruh program dan kegiatan dapat berjalan dengan optimal, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia perlu memastikan ketersediaan anggaran yang memadai. Hal ini mencakup alokasi anggaran yang tepat sesuai prioritas serta efisiensi dalam penggunaan anggaran untuk menghindari pemborosan. Pengelolaan anggaran yang akuntabel perlu menjadi perhatian utama. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia harus membentuk tim atau komite pengawasan yang bertugas untuk memantau penggunaan anggaran agar sesuai dengan rencana kerja, sehingga potensi penyimpangan atau ketidaksesuaian dapat diminimalisir sejak dini.

Untuk pelaksanaan program diharapkan mengikuti kaidah-kaidah yang telah ditetapkan, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, serta keberlanjutan. Setiap program dan kegiatan perlu dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip-prinsip tersebut agar tujuan pembangunan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dapat tercapai dengan efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Sebagai bagian dari rencana tindak lanjut, seluruh stakeholder di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ini diharapkan melakukan pemantauan secara berkala untuk mengevaluasi perkembangan kegiatan yang telah dilakukan. Laporan hasil pemantauan akan menjadi acuan untuk perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan di tahun-tahun mendatang. Selain itu, tindak lanjut berupa perencanaan dan penyusunan strategi untuk menghadapi tantangan yang mungkin timbul juga perlu disiapkan sejak dini, agar setiap hambatan dapat diatasi dengan solusi yang tepat dan berbasis data. Setelah pelaksanaan program, perlu dilakukan pemantauan secara berkala untuk mengevaluasi perkembangan kegiatan. Hal ini dapat berupa pelaporan mingguan, bulanan, atau tahunan yang akan menjadi dasar untuk mengidentifikasi permasalahan, keberhasilan, dan dampak dari kegiatan yang telah dilaksanakan. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia diharapkan dapat membentuk tim evaluasi yang bertugas melakukan pemantauan ini.

Berdasarkan hasil evaluasi, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia perlu menyusun strategi untuk mengatasi tantangan di masa mendatang. Strategi ini mencakup identifikasi kebutuhan yang perlu diprioritaskan, rencana anggaran, dan skala prioritas program. Penyusunan strategi akan membantu Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menjadi lebih siap dalam menghadapi dinamika kebutuhan masyarakat yang mungkin berubah.

Akhir kata, semoga rencana kerja ini dapat menjadi pedoman yang bermanfaat dalam mewujudkan visi pembangunan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang lebih maju, sejahtera, dan berkelanjutan.

Parit Malintang, 22 Oktober 2025

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**



MAIZAR, S.Sos

Pembina Utama Muda

NIP. 19700528 199303 1 001

HASIL PRA EVALUASI IMPLEMENTASI SAKIP TAHUN 2026 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	NAMA DOKUMEN	HASIL PRAEVALUASI
1.	RPJMD Priode 2025 – 2029	
2.	Renstra Priode 2025 – 2029	
3.	Pohon Kinerja dan Cascading Priode 2025 - 2029	
4.	Perjanjian Kinerja Tahun 2025	
5.	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	
6.	Perjanjian Kinerja Tahun 2026	
7.	LKJiP Tahun 2025	
8.	Rencana Aksi Tahun 2025	
9.	Rencana Aksi Perubahan Tahun 2025	
10.	Rencana Aksi Tahun 2026	
11.	IKU Priode 2025-2029	
12.	Renja Tahun 2025	
13.	Renja Perubahan Tahun 2025	
14.	Renja Tahun 2026	✓
15.	Monev Capaian Kinerja Tahun 2025 sampai Triwulan 2 Tahun 2026	
16.	Pedoman Teknis Perencanaan 2026	
17.	Pedoman Teknis Pengukuran dan Pengumpulan Data Kinerja 2026	
18.	Pedoman Teknis Monitoring dan Evaluasi Internal 2026	
19.	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2026	
20.	Tindak Lanjut LHE Inspektorat Tahun 2025	
21.	SOTK	

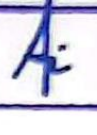
Catatan :

Dokumen ini telah dilakukan Pra Evaluasi Impelementasi SAKIP

Evaluator,



(WAHYUNI, SE, FRMP)

REVISI BERJENJANG					
Ketua Tim		Dainis		Wanjab	
Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf
25/06-26		25/06-26		25/06-26	